



**KEMENTERIAN
PERTANIAN**



LAPORAN TAHUNAN 2025



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

**LAPORAN TAHUNAN
BADAN PPSDMP
TAHUN 2025**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
J A K A R T A**

2025





KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan fungsi selama tahun 2025, yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Program dan kegiatan sebagai wujud implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian

Pertanian dan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Laporan Tahunan ini menyajikan rangkuman capaian kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian baik capaian anggaran dan fisik serta capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari s.d. Desember Tahun 2025.

Laporan Tahunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik dan mendukung pencapaian Badan PPSDMP selama ini.

Jakarta, 13 April 2026

Kepala Badan PPSDMP



Dr. Idna Widi Arsanti, S.P., M.P.

NIP. 197301141999032002





EXECUTIVE SUMMARY

Dalam kerangka pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran makro pembangunan nasional, antara lain melalui peningkatan produktivitas, peningkatan investasi sektor riil, perbaikan kualitas pasar tenaga kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan pertanian adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, profesional, mandiri, dan berdaya saing.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha serta memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha.

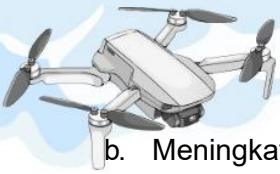
Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2025-2029 difokuskan pada dua pokok utama, yaitu:

- a. Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia dengan Strategi: 1) Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (human capital) pertanian berbasis kompetensi; 2) Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif.
- b. Tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional dengan strategi Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDMP dalam mewujudkan *good government & clean governance*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 Badan PPSDMP didukung oleh 2.848 orang aparat yang terdiri atas 1.786 orang aparat laki-laki dan 1.062 orang aparat perempuan. Adapun pokok-pokok Visi Badan PPSDMP adalah “Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045” dengan 4 Kata Kunci yaitu SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri dan SDM pertanian sejahtera. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

- a. Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas Aset SDM Pertanian di masa yang akan datang;





- b. Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian aset SDM Pertanian; dan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan professional.

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani yang diukur melalui indikator Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas.
- b. Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan professional yang diukur melalui indikator kinerja tata Kelola organisasi.

Pagu anggaran Kantor Pusat Badan BPPSDM Tahun Anggaran Tahun 2025 adalah Rp865.394.963.000,- yang dibagi dalam 2 (dua) Program Utama yaitu A. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, dan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian; dan B. Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Realisasi anggaran Badan PPSDMP berdasarkan kegiatan utama Tahun 2025 yaitu Rp859.441.454.463 atau **99,31%** dari pagu Rp865.394.963.000. Realisasi anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Badan PPSDMP **tertinggi** adalah pada kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian yaitu Rp1.198.748.992 (99,94%) dari pagu Rp1.199.412.000, realisasi anggaran terendah adalah pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP yaitu Rp299.856.622.082 (98,74%) dari pagu anggaran Rp303.688.924.000. Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian tahun 2025 rata-rata mencapai 100,00%. Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025 rata-rata mencapai 100,00%. Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian tahun 2025 rata-rata 102,32%. Presentase Capaian fisik output Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025 rata-rata 100,00%. Persentase capaian fisik output kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2025 rata-rata mencapai 100,00%.





Capaian dan perkembangan Program Kegiatan Utama Badan PPSDMP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. BP (Brigade Pangan)
BPPSDMP telah membentuk 1.771 Brigade Pangan pada Lokasi OPLAH 2024 di 12 Provinsi antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Pada tahun 2025, BPPSDMP telah membentuk 2.079 BP pada Lokasi OPLAH 2025 dan 513 BP pada Lokasi CSR.
- b. Perkembangan kegiatan penumbuhan dan penguatan P4S sampai dengan akhir Tahun 2025 total berjumlah 1.705 Kelompok terdiri dari kelas kelompok Pratama, Madya dan Utama.
- c. Sampai dengan Tahun 2025, Dari 76.158 Peserta yang mengikuti pelatihan, sebanyak 71.493 Peserta telah meningkat kompetensinya atau sebesar 93,87%.
- d. Sampai dengan bulan Desember 2025, jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah 14.732 KEP.
- e. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian Tahun 2025, Jumlah Anggota Kelompok Tani 24.446.778; Gabungan Kelompok Tani 64.887; dan Kelembagaan Ekonomi Petani 14.732
- f. Jumlah Alumni Polbangtan, PEPI, dan SMKPP Tahun 2025 adalah 1.761 orang.
- g. Sampai dengan tahun 2025 program YESS sudah memberikan bantuan kepada 316.369 penerima manfaat dari target sebanyak 220.000.
- h. Jumlah PWMP menurut Unit Kerja (UPT) lingkup Badan PPSDMP tahun 2025 adalah 342 kelompok.
- i. Pusbintan telah melaksanakan uji kompetensi sebanyak 5.472 orang.
- j. Capaian Kinerja Pelaksanaan TLHP Inspektorat Jenderal Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 96,67% dari target 90%.
- k. Temuan LHP BPK di Badan PPSDMP terdiri dari 3 (tiga) judul LHP tahun 2024 dan 2025 dengan jumlah 36 rekomendasi. Dari total 36 rekomendasi LHP BPK RI, sudah ditindak lanjuti sebanyak 36 rekomendasi. Rekomendasi yang sudah dinyatakan sesuai sebanyak 35 rekomendasi dan belum sesuai sebanyak 1 rekomendasi.
- l. Capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2025 yaitu Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas 102% (Sangat Baik) dan Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP (Indeks) 120,54% (Sangat Baik).





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA	3
A. DASAR HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PPSDMP	3
B. ORGANISASI UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) LINGKUP BADAN PPSDMP	8
C. KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA LINGKUP BADAN PPSDMP TAHUN 2025	16
BAB III RENCANA PROGRAM KEGIATAN	20
A. VISI DAN MISI BADAN PPSDMP	20
B. TUJUAN	20
C. SASARAN PROGRAM	20
D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PPSDMP TAHUN 2025	21
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PPSDMP TA 2025	21
BAB IV KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	22
A. PAGU ANGGARAN BADAN PPSDMP TAHUN 2025	22
B. REALISASI ANGGARAN BADAN PPSDMP TAHUN 2025	23
C. REALISASI BELANJA BADAN PPSDMP	26
D. REALISASI ANGGARAN KEWENANGAN BADAN PPSDMP	27
E. REALISASI ANGGARAN SATKER KANTOR PUSAT TAHUN 2025	28
F. REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PELATIHAN PERTANIAN TAHUN 2025	28
G. REALISASI ANGGARAN SATKER KANTOR DAERAH/UPT PENDIDIKAN PERTANIAN TAHUN 2025	29
H. REALISASI ANGGARAN SATKER DEKONSENTRASI TAHUN 2025	30
I. REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT KEGIATAN TAHUN 2025	33
BAB V CAPAIAN FISIK BADAN PPSDMP SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025	41
A. PROGRAM PENDIDIKAN PELATIHAN VOKASI TAHUN 2025	41
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2025	43
BAB VI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PPSDMP TAHUN 2025	45
A. CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA BADAN PPSDMP TAHUN 2025	45
B. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	48
C. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN TAHUN 2025	53
D. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2025	70
E. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN TAHUN 2025	83
F. CAPAIAN KEGIATAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN TAHUN 2025	93
G. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) INSPEKTORAT JENDERAL	98





H. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BPK.....	99
I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PPSDMP TAHUN 2025	100
BAB VI PRESTASI DAN PENGHARGAAN BADAN PPSDMP TAHUN 2025	103
A. PENGHARGAAN MURI ATAS REKOR PEREKRUTAN PETANI MUDA TERBANYAK.....	103
B. PENGHARGAAN MURI ATAS REKOR PELIBATAN PENYULUH PENDAMPING TERBANYAK DALAM BRIGADE PANGAN	103
C. PENGHARGAAN SWASEMBADA PANGAN TAHUN 2025 KEPADA PENANGGUNG JAWAB PROVINSI DAN KABUPATEN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN	104
D. SERTIFIKAT PENGAKUAN KELAYAKAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI ASN.....	105
E. PENGHARGAAN ZOOM EVENT INNOVATOR AWARD ASIA TAHUN 2025	106
BAB VII PENUTUP	107





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jabatan Fungsional dan Jumlah Aparat Fungsional lingkup Badan PPSDMP Tahun 2025	18
Tabel 2. Pagu Anggaran Badan PPSDMP berdasarkan Kegiatan Program Utama Tahun 2025	22
Tabel 3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Badan PPSDMP Tahun 2025	24
Tabel 4. Pagu Dan Realisasi Kegiatan Per Kewenangan Badan PPSDMP	26
Tabel 5. Pagu Dan Realisasi Kewenangan Badan PPSDMP Tahun 2025	27
Tabel 6. Realisasi Anggaran Satker Kantor Pusat Tahun 2025	28
Tabel 7. Realisasi Satker Kantor Daerah/UPT Pelatihan Pertanian Tahun 2025	28
Tabel 8. Realisasi Satker Kantor Daerah/UPT Pendidikan Pertanian Tahun 2025	29
Tabel 9. Realisasi Satker Dekonsentrasi Tahun 2025	31
Tabel 10. Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2025	34
Tabel 11. Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025	35
Tabel 12. Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2025	36
Tabel 13. Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	38
Tabel 14. Realisasi Anggaran Per Output Pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2025	39
Tabel 15. Capaian Fisik Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2025	41
Tabel 16. Capaian Fisik Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025	42
Tabel 17. Capaian Fisik Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2025	42
Tabel 18. Capaian Fisik Output Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025	43
Tabel 19. Capaian Fisik Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2025	44
Tabel 20. Capaian Pembentukan Brigade Pangan OPLAH 2024	46
Tabel 21. Capaian Pembentukan Brigade Pangan 2025 s.d 31 Desember 2025	47
Tabel 22. P4S Menurut Klasifikasi Tahun 2025	55
Tabel 23. Persentase SDM Pertanian yang meningkat kompetensinya	57
Tabel 24. Target Brigade Pangan (BP) dan Realisasi Brigade Pangan (BP) Dilatih Tahun 2024 dan 2025	58
Tabel 25. Pelaksanaan Kegiatan TOT Mendukung Brigade Pangan Bagi Penyuluh Pertanian Tahun 2025	59
Tabel 26. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tahun 2025	82





Tabel 27. Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok	83
Tabel 28. Rekapitulasi Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025	83
Tabel 29. Rincian umlah PWMP Menurut Unit Kerja (UPT) Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2025	87
Tabel 30. Capaian Pusat Pendidikan Pertanian dalam program Brigade Pangan, Optimasi Lahan (OPLAH), Luas Tambah Tanam (LTT), dan pengembangan Padi Gogo di Kabupaten Barru, Takalar, Jeneponto, dan Sinjai	88
Tabel 31. Mahasiswa dan Siswa Aktif di Polbangtan, PEPI dan SMK-PP	90
Tabel 32. Rincian Jumlah Alumni Pada Polbangtan, PEPI dan SMK PP Tahun 2025	91
Tabel 33. Target dan Realisasi LTT Kab. Cianjur dan Indramayu	97
Tabel 34. Realisasi Pembentukan Brigade Pangan di Provinsi Jawa Barat	98
Tabel 36. Data Pemantauan Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal TA 2025	99
Tabel 37. Progress Tindak Lanjut Pemeriksaan LHP BPK RI TA 2025	100
Tabel 38. Capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2025	100





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase Pegawai Badan PPSDMP Menurut Golongan Tahun 2025.....	16
Grafik 2. Persentase Pegawai Badan PPSDMP Menurut Pendidikan Tahun 2025.....	17
Grafik 3. Persentase Pagu Anggaran Badan PPSDMP Berdasarkan Kegiatan Program Utama Tahun 2025	23
Grafik 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Kantor Pusat BPPSDMP Tahun 2025 ...	25
Grafik 5. Persentase Realisasi Pagu Anggaran Badan PPSDMP Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2025.....	25
Grafik 6. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Badan PPSDMP Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025.....	26
Grafik 7. Persentase Realisasi Anggaran Kewenangan Badan PPSDMP Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025	27
Grafik 8. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2025	35
Grafik 9. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025	36
Grafik 10. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 2025.....	37
Grafik 11. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 2025.....	39
Grafik 12. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pada Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2025	40





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2025	4
Gambar 2. Peliputan Kegiatan Pelantikan Pejabat Administrator, Direktur PEPI, Pejabat Fungsional serta Pengukuhan Ketua Kelompok Substansi serta Ketua Tim Kerja Lingkup BPPSDMP di Jakarta Tanggal 16 September 2025	19
Gambar 3. Pembinaan Pegawai lingkup BPPSDMP di Gedung Bina Karakter BBPMKP Ciawi, Tanggal 18 Mei 2025.....	49
Gambar 4. Bimbingan Teknis Produksi Video Kreatif Strategi Penyajian Informasi Pertanian dan Optimalisasi Konten Digital Secara Menarik dan Informatif di Mess SDM Jakarta, Tanggal 26-27 November 2025	49
Gambar 5. Reviu APIP dan Penelaahan RKA-K/L TA.2025 di RR.Oval Kantor BPPSDMP Jakarta Tanggal 17-18 Desember 2025	50
Gambar 6. Entry Meeting Pengawasan aset lingkup BPPSDMP Dalam Rangka Penatausahaan Aset Pusat Badan PPSDMP di Kantor BPPSDMP Jakarta, Tanggal 17 November 2025.....	51
Gambar 7. Rapat Pimpinan Lingkup Badan PPSDMP – RAPIM B di Aula Bina Karakter BBPMKP Ciawi, Tanggal 03 Desember 2025.....	51
Gambar 8. Pembahasan Perpindahan Gaji Penyuluh Pertanian Tahap Pertama di Hotel Bumi Wiyata Depok, Tanggal 13-15 November 2025.....	53
Gambar 9. Knowledge Sharing Keberlanjutan Program READSI bagi Penyuluh dan Penyusunan Buku Cerita Sukses Program READSI, Hotel Swissbel Bogor, Tanggal 7 – 10 Januari 2025.....	54
Gambar 10. Rekonsiliasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2019 – 2024 Program READSI, Hotel Swissbel Bogor, 7 – 10 Januari 2025	54
Gambar 11. Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 2024 dan Tindak Lanjut LHP BPK 2023, Hotel Swissbel Bogor, Tanggal 7 – 10 Januari 2025.....	54
Gambar 12. Rekonsiliasi Rekening Khusus IFAD Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, Hotel Swissbel Bogor, Tanggal 9 – 11 Januari 2025.....	55
Gambar 13. Koordinasi Laporan Akhir Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Program READSI, Luminor Bogor, Tanggal 22 – 24 Januari 2025.....	55
Gambar 14. Pengembangan P4S Mendukung Replikasi Program READSI, BBPMKP Ciawi, Tanggal 11 – 13 Maret 2025	56
Gambar 15. Koordinasi Penguatan Peran P4S Mewujudkan Swasembada Pangan, BBPMKP Ciawi – Jawa Barat, Tanggal 4 – 6 Juli 2025	57
Gambar 16. Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, TUK LSP Pertanian Kementerian Pertanian, Januari – Desember 2025	59
Gambar 17. Koordinasi Penguatan Peran P4S Mewujudkan Swasembada Pangan, BBPKMKP Ciawi – Jawa Barat, Tanggal 2 – 4 Juli 2025	60
Gambar 18. Audiensi Survailen ISO 9001:2015 Pusat Pelatihan Pertanian, Ruang Rapat AOR Pusat Pelatihan Pertanian, tanggal 27 November 2025	61





Gambar 19. Monitoring Magang Usaha Tani Penerima DAK 2025 di P4S, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, September 2025	61
Gambar 20. Koordinasi Kegiatan dan Anggaran Pelatihan Brigade Pangan Tahun 2025, BBPMKP Ciawi, Tanggal 2 – 3 Juli 2025	62
Gambar 21. Pendampingan dan Pelepasan Peserta Magang Taiwan 2025, BBPMKP Ciawi, 8 – 9 Juni 2025.....	62
Gambar 22. Koordinasi dan Audiensi Program Magang Luar Negeri, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Tanggal 7 – 8 Oktober 2025	63
Gambar 23. Koordinasi Penjaminan Mutu Pelatihan, Museum Tanah dan Pertanian, Tanggal 25 – 27 Juni 2025.....	64
Gambar 24. Akreditasi Program Pelatihan, UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah, November – Desember 2025.	64
Gambar 25. Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi (Survailen), TUK BBIB Singosari, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batu, Fakultas Pertanian Mjokerto, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah, DWP Perhaptani Lembang, BIB Lembang, DPW Perhaptani Jawa Timur, FP Universitas Majalengka dan SMKPP Negeri Saree Aceh, BBPP Kupang, BBPP Binuang, BBPP Lembang, Polbangtan Malang, Januari – Desember 2025	65
Gambar 26. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Kantor Sekretariat TUK Mandiri LSP Pertanian, Mei – Desember 2025	66
Gambar 27. Pertemuan Forum Komunikasi Asesor Kompetensi (FK ASKOMTAN) Tahun 2025, Bapeltan Soropadan – Jawa Tengah, 8 – 9 November 2025.....	67
Gambar 28. Pendampingan dan Monitoring Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 17 – 18 Maret 2025.....	69
Gambar 29. Penguatan Program Mendukung Swasembada Pangan Provinsi Kalimantan Utara, 19 – 22 Mei 2025.....	69
Gambar 30. Penguatan Program Mendukung Swasembada Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, September – November 2025	69
Gambar 31. Koordinasi Luas Tambah Tanam, Penyerapan Gabah dan Sosialisasi Inpres No. 3 Tahun 2025 Pendayagunaan Penyuluh Pertanian di Gor Tridarma Petrokimia Gresik Provinsi Jawa Timur, Tanggal 14 s.d 15 Maret 2025	70
Gambar 32. MSPP Edisi Spesial dengan tema “Kementan Tegaskan Brigade Pangan Garda Terdepan Menuju Swasembada Pangan Nasional” di BBPMKP Ciawi-Bogor, Tanggal 12 Juni 2025	71
Gambar 33. Kegiatan Kopdes Merah Putih yang diusulkan Mock up di Desa Sidamulya, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 25 – 27 Juni 2025	72
Gambar 34. Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, Penyaluran BOP, dan Realisasi Dana Dekonsentrasi di BRMP Papua, Tanggal 24 Juli 2025.....	74
Gambar 35. Focus Group Discussion (FGD) Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pasca Terbitnya Inpres No 3 Tahun 2025 di Ruang Majelis	





	Fakultas Pertanian, Kantor Dekanat Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Tanggal 7 – 8 Agustus 2025.	76
Gambar 36.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Nota Dinas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani Nelayan Tahun 2026 di Ruang Rapat Biro Hukum, Gd. A Lt. 5, Tanggal 3 September 2025	77
Gambar 37.	Pendampingan Kunjungan Kementerian Pertanian dan Ketahanan Makanan, Malaysia di Wilayah Yogyakarta dan Sekitarnya, Tanggal 6 – 9 Oktober 2025	80
Gambar 38.	MSPP Vo. 33 dengan Tema ” Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) Urusan Pemerintah Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian” di Ruang AWR Pusluh, Tanggal 17 Oktober 2025	81
Gambar 39.	Sosialisasi dan Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) di Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025	82
Gambar 40.	Pengukuhan lembaga TVET mitra program YESS	84
Gambar 41.	Kegiatan Kerjasama dan Koordiansi dengan Lembaga Keuangan	85
Gambar 42.	Kegiatan Evaluasi Tugas Belajar	88
Gambar 43.	Bimbingan teknis Pendamping BP di Wilayah SulSel	89
Gambar 44.	Gerakan Panen Bersama wilayah Kabupaten Barru	90
Gambar 45.	Rapat Tim Kecil menindaklanjuti Hasil Evaluasi PTKL dan Penyiapan Sekolah Kedinasan	92
Gambar 46.	Identifikasi Aset Pengetahuan, Pusat Penilaian dan Pengembangan ASN Pertanian, Tahun 2025	95
Gambar 47.	Sistem Informasi Pembelajaran Platform Belajar ASN Mandiri dan Aktif (PLASMA)	95
Gambar 48.	<i>Launching Kementerian Pertanian Corporate University, 26 Agustus 2025</i>	95
Gambar 49.	Penghargaan MURI kepada Menteri Pertanian Dr.Ir.H.Andi Amran Sulaiman, MP atas rekor Perekrutan Petani Muda Terbanyak, di Auditorium Kementan Jakarta, Tanggal 16 Desember 2025	103
Gambar 50.	Penghargaan MURI kepada Menteri Pertanian Dr.Ir.H.Andi Amran Sulaiman, MP atas rekor Pelibatan Penyuluh Pendamping Terbanyak dalam Brigade Pangan yaitu 38.235 penyuluh pendamping di Auditorium Kementan Jakarta, Tanggal 16 Desember 2025	103
Gambar 51.	Penghargaan Swasembada Pangan Tahun 2025 kepada Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten (Eselon II) lingkup Kementerian Pertanian, di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta, tanggal 16 Desember 2025	105
Gambar 52.	Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Kompetensi ASN	105
Gambar 53.	Penghargaan Zoom Event Innovator Award Asia tahun 2025 Kepada Pusluhtan Badan PPSDMP di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2025	106





BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran makro pembangunan nasional, antara lain melalui peningkatan produktivitas, peningkatan investasi sektor riil, perbaikan kualitas pasar tenaga kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan pertanian adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, profesional, mandiri, dan berdaya saing. SDM pertanian yang kompeten diharapkan mampu mengadopsi inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi usaha tani, mengembangkan kewirausahaan di sektor pertanian, serta mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, dinamika pasar global, serta perkembangan teknologi digital di bidang pertanian.

Dalam upaya mendukung pembangunan SDM pertanian tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memiliki peran penting dalam menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha. BPPSDMP merupakan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas melaksanakan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi serta memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis yang meliputi penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian, pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian, penyuluhan pertanian, serta penguatan tata kelola organisasi melalui reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan non- aparatur pertanian, termasuk penyuluh pertanian, petani, pelaku usaha pertanian, serta generasi muda pertanian agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan pertanian yang produktif dan inovatif.





Selain itu, penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam proses transfer teknologi, inovasi, serta peningkatan kapasitas petani di tingkat lapangan. Oleh karena itu, penguatan sistem penyuluhan pertanian yang modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan SDM pertanian.

Sebagai bentuk implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terukur. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah melalui penyusunan laporan tahunan yang memuat informasi mengenai pelaksanaan program, capaian kegiatan, serta realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu.

Laporan Tahunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama tahun anggaran 2025. Laporan ini memuat rangkuman pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, termasuk capaian fisik dan keuangan serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

Melalui penyusunan laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja BPPSDMP dalam melaksanakan program pengembangan SDM pertanian, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.





BAB II

ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

A. DASAR HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PPSDMP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian pada pasal 269, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
6. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

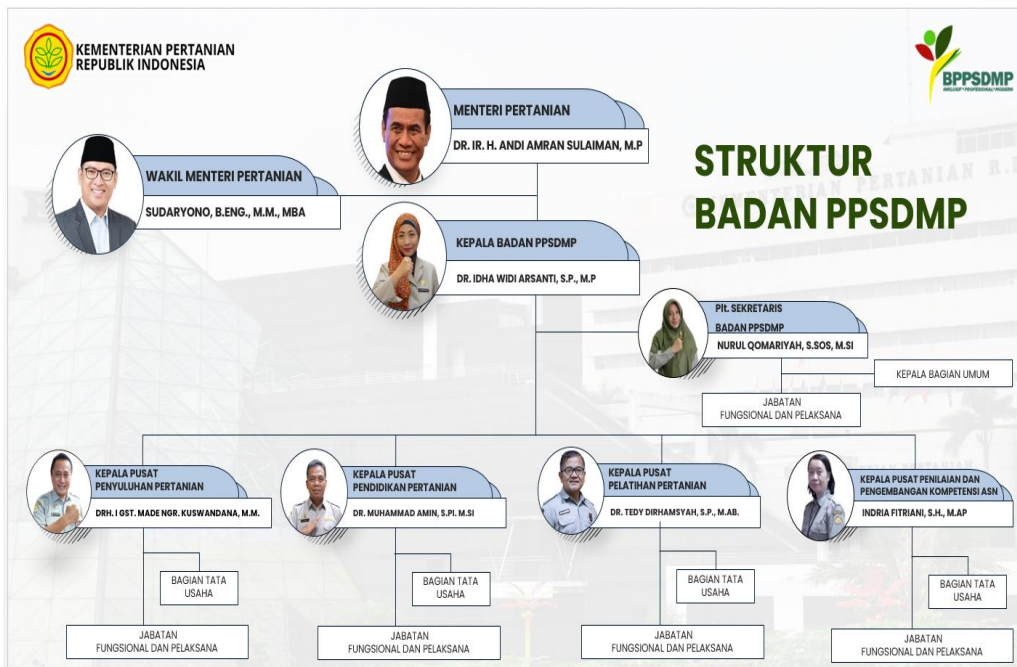
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas :

1. Sekretariat Badan PPSDMP;
2. Pusat Penyuluhan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian;
4. Pusat Pelatihan Pertanian;
5. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian





STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2025



Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur





lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

- d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan bantuan hukum lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- f. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Sekretariat Badan terdiri atas Bagian Umum; dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Bagian umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

2. Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan, program dan kerja sama di bidang penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian
- d. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian;
- e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan petani dan kewirausahaan agribisnis;
- g. Pengelolaan informasi manajemen penyuluhan pertanian;
- h. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
- j. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan





- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup pusat penyuluhan pertanian.

Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian.

3. Pusat Pendidikan Pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan, program dan kerja sama di bidang pendidikan pertanian;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan pertanian;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- d. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian;
- e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas ketenagaan pendidikan pertanian;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
- h. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan pertanian; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Pendidikan Pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumberdaya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik Negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Pusat Pendidikan Pertanian.

4. Pusat Pelatihan Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan, program dan kerja sama di bidang pelatihan pertanian;





- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- c. Pelaksanaan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia non aparatur pertanian;
- d. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian;
- e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas ketenagaan pelatihan pertanian;
- f. Penyusunan standar kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian;
- g. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- h. Penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- j. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan pertanian; dan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup pusat pelatihan pertanian.

Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumberdaya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik Negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Pusat Pelatihan Pertanian.

5. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian, pengembangan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- b. Pengelolaan *assessment center* dan pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- c. Pelaksanaan penyusunan standar dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- d. Pengelolaan dan pemanfaatan aset pengetahuan bidang pertanian;





- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian; dan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian terdiri atas Bagian Tata Usaha; dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

B. ORGANISASI UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) LINGKUP BADAN PPSDMP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Lingkup Badan PPSDMP, maka kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi UPT Badan PPSDMP adalah sebagai berikut :

1. Unit Pelayanan Teknis (UPT) :

Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu/tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. UPT lingkup Badan PPSDMP Tahun 2025 terdiri atas :

- a. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan);
- b. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI);
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMKPPN);
- d. Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP);
- e. Balai Besar Pelatihan;
- f. Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan).

Kedudukan, tugas dan fungsi organisasi masing-masing UPT lingkup Badan PPSDMP adalah sebagai berikut :

a. Polbangtan

Polbangtan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian. Polbangtan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pertanian. Polbangtan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan kerjasama pendidikan;





- 2) Pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pertanian;
- 3) Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian;
- 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
- 6) Pengelolaan administrasi umum;
- 7) Pengelolaan *teaching factory/teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan dan asrama;
- 8) Pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- 9) Pengembangan sistem penjaminan mutu;
- 10) Pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan Organisasi Polbangtan terdiri atas :

- 1) Direktur dan Wadir;
- 2) Senat;
- 3) Dewan Penyantun;
- 4) Satuan Pengawasan Internal;
- 5) Unit Penjaminan Mutu;
- 6) Bagian Umum;
- 7) Jurusan;
- 8) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 9) Unit Penunjang Akademik; dan
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Lokasi Polbangtan lingkup Badan PPSDMP meliputi :

- 1) Polbangtan Medan, berlokasi di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Polbangtan Bogor, berlokasi di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
- 3) Polbangtan Yogyakarta-Magelang, berlokasi di :
 - a) Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Kampus Bagi Kampus Yogyakarta
 - b) Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Bagi Kampus Magelang
- 4) Polbangtan Malang, berlokasi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
- 5) Polbangtan Gowa, berlokasi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- 6) Polbangtan Manokwari, berlokasi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

b. PEPI

PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dibidang enjineriing dan teknologi pertanian di lingkungan Kementerian





Pertanian. PEPI mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang enjinering dan teknologi pertanian. PEPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan kerjasama pendidikan;
- 2) Pelaksanaan pendidikan vokasi dibidang enjiniring dan teknologi pertanian;
- 3) Pelaksanaan penelitian terapan dibidang enjiniring dan teknologi pertanian;
- 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
- 6) Pengelolaan administrasi umum;
- 7) Pengelolaan *teaching factory/teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama;
- 8) Pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- 9) Pengembangan sistem penjaminan mutu;
- 10) Pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan organisasi PEPI terdiri atas ;

- 1) Direktur dan Wadir;
- 2) Senat;
- 3) Dewan Penyantun;
- 4) Satuan Pengawasan Internal;
- 5) Unit Penjaminan Mutu;
- 6) Subbagian Umum;
- 7) Program Studi;
- 8) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 9) Unit Penunjang Akademik; dan
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

PEPI berlokasi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

c. **SMKPPN**

SMKPPN adalah unit pelaksana teknis dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan program kejuruan dibidang pertanian. SMKPPN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi, pengabdian kepada masyarakat dibidang kejuruan pertanian dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian. SMKPPN menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan Kerjasama
- 2) Pelaksanaan proses belajar mengajar
- 3) Pelaksanaan kegiatan kokulikuler dan ekstrakulikuler





- 4) Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik
 - 5) Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian
 - 6) Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bagi pendidik
 - 7) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian
 - 8) Pengelolaan *teaching factory/teaching farm* sebagai sarana pembelajaran
 - 9) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan
 - 10) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, urusan keuangan, dan milik/kekayaan negara; dan
 - 11) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- Susunan organisasi SMKPP terdiri atas :

- 1) Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
- 2) Subbagian Tata Usaha; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Lokasi SMKPP meliputi :

- 1) SMKPP Sembawa berlokasi di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) SMKPP Banjarbaru berlokasi di Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- 3) SMKPP Kupang berlokasi di Kecamatan Lili Fataleu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

d. BBPMKP

BBPMKP adalah UPT Badan PPSDMP yang melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan dasar, pelatihan fungsional non bidang pertanian, pelatihan dasar, pelatihan fungsional non bidang pertanian bagi aparatur pertanian serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia. BBPMKP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan kerjasama;
- 2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- 3) Penyelenggaraan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur;
- 4) Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi aparatur;
- 5) Penyelenggaraan pelatihan fungsional non bidang pertanian bagi aparatur;
- 6) Penyelenggaraan pelatihan profesi di bidang pertanian;





- 7) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
- 8) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- 9) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- 10) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, pertanian;
- 11) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- 12) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- 13) Pengelolaan unit inkubator manajemen;
- 14) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- 15) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- 16) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multimedia pertanian; dan
- 17) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia pertanian, tata usaha, urusan keuangan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara.

BBPMKP terdiri atas :

- 1) Bagian Umum;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

BBPMKP Berlokasi di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

e. Balai Besar Pelatihan

Balai Besar Pelatihan adalah UPT Badan PPSDMP yang melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Balai Besar Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan kerja sama; Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- 2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- 3) Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
- 4) Penyelenggaraan pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;





- 5) Penyelenggaraan pelatihan profesi di bidangnya;
- 6) Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi di bidangnya;
- 7) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- 8) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- 9) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya;
- 10) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- 11) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya;
- 12) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional pelatihan teknis dan profesi, serta penyusunan model dan teknik pelatihan di bidangnya;
- 13) Pengelolaan unit inkubator agribisnis;
- 14) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- 15) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan pelatihan;
- 16) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- 17) Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan; dan
- 18) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, urusan keuangan, rumah tangga, hubungan masyarakat penatausahaan barang milik/kekayaan negara, dan instalasi.

Balai Besar Pelatihan terdiri atas :

- 1) Bagian umum
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Lokasi SMK-PP lingkup BPPSDMP meliputi:

- 1) Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang berlokasi di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
- 2) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang berlokasi di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 3) Balai Besar Pelatihan Pertanian Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan berlokasi di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
- 4) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang berlokasi di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
- 5) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu berlokasi di Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur
- 6) Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku berlokasi di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan





- 7) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara berlokasi di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

f. Bapeltan

Balai pelatihan pertanian yang disebut Bapeltan adalah UPT Badan PPSDMP yang melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Bapeltan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Bapeltan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- 2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- 3) Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
- 4) Penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis, dan profesi di bidangnya;
- 5) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- 6) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- 7) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- 8) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya;
- 9) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan profesi, serta penyusunan model dan teknik pelatihan di bidangnya;
- 10) Pengelolaan unit inkubator agribisnis;
- 11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- 12) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- 13) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- 14) Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan; dan
- 15) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, urusan keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara.

Bapeltan terdiri atas:

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Lokasi Bapeltan meliputi:

- 1) Bapeltan Jambi berlokasi di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;





2) Bapeltan Lampung berlokasi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

g. Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian yang disebut BB Pustaka adalah UPT BPPSDMP yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan literasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BB Pustaka memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan karya cetak dan karya rekam Kementerian Pertanian;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan pertanian;
- 4) Pelaksanaan pelestarian koleksi perpustakaan;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan literasi pertanian;
- 6) Pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan pertanian dan penyebarluasan hasil penerbitan;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan pengetahuan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- 8) Pelaksanaan kerja sama perpustakaan dan penerbitan pertanian;
- 9) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan, literasi, dan penerbitan pertanian; dan
- 10) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, urusan keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara lingkup BB Pustaka.

BB Pustaka berlokasi di Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

h. Museum Tanah dan Pertanian

Museum Tanah dan Pertanian yang disebut Mustani adalah UPT Badan PPSDMP yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan Museum Tanah dan Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Mustani memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan koleksi museum;
- 3) Pelaksanaan registrasi dan inventarisasi koleksi museum;
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan, penyimpanan, perawatan dan pengawetan koleksi museum;
- 5) Pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan koleksi museum;
- 6) Pelaksanaan layanan edukasi koleksi museum;
- 7) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum;
- 8) Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan serta promosi di bidang museum tanah dan pertanian;





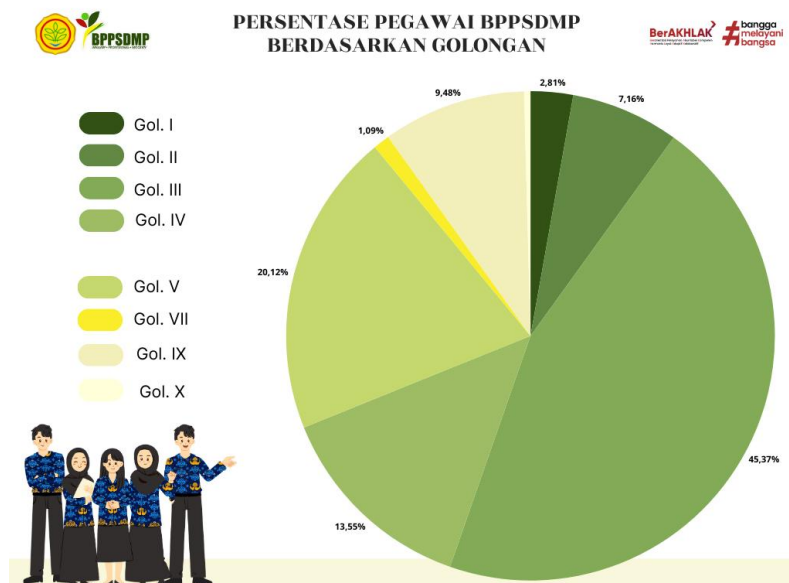
- 9) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang museum tanah dan pertanian; dan
 - 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Mustani.
- Mustani terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana Mustani berlokasi di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

C. KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA LINGKUP BADAN PPSDMP TAHUN 2025

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 Badan PPSDMP didukung oleh pegawai **ASN dan PPPK**. Total jumlah pegawai Badan PPSDMP tahun 2025 adalah **2.848 orang aparat** yang terdiri atas 1.786 orang aparat laki-laki dan 1.062 orang aparat perempuan. Komposisi pegawai Badan PPSDMP pada tahun 2025 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan Golongan

Rincian jumlah pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan dari total 2.848 orang yaitu terdiri dari : golongan I yaitu 80 orang (2,81%), golongan II yaitu 204 orang (7,16%), golongan III yaitu 1292 orang (45,37%), golongan IV yaitu 386 orang (13,55%), golongan V yaitu 573 orang (20,12%), golongan VII yaitu 31 orang (1,09%), golongan IX yaitu 270 orang (9,48%), dan golongan X yaitu 12 orang (0,42%). Persentase pegawai Badan PPSDMP menurut golongan tahun 2025 pada grafik 1.



Grafik 1. Persentase Pegawai Badan PPSDMP Menurut Golongan Tahun 2025

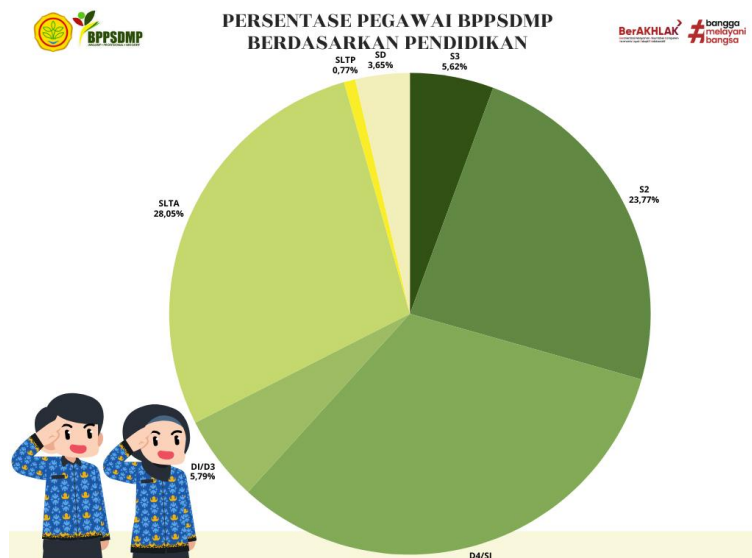




Persentase pegawai Badan PPSDMP menurut golongan yang **tertinggi** adalah pada golongan III yaitu 45,37%, sedangkan yang **terendah** adalah pada golongan X yaitu 0,42%.

2. Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan Pendidikan

Rincian jumlah pegawai Badan PPSDMP berdasarkan pendidikan dari total 2.848 orang yaitu terdiri dari: S3 yaitu 160 orang (5,62%), S2 yaitu 677 orang (23,77%), D4/S1 yaitu 921 orang (32,34%), D1/D3 yaitu 165 orang (5,79%), SLTA yaitu 799 orang (28,05%), SLTP yaitu 22 orang (0,77%) dan SD yaitu 104 orang (3,65%). Persentase pegawai Badan PPSDMP menurut pendidikan tahun 2025 pada grafik 2.



Grafik 2. Persentase Pegawai Badan PPSDMP Menurut Pendidikan Tahun 2025

Persentase pegawai Badan PPSDMP menurut pendidikan yang **tertinggi** adalah pada pendidikan D4/S1 yaitu 32,34%, sedangkan yang **terendah** adalah pada jenjang pendidikan SLTP yaitu 0,77%.

3. Jabatan Fungsional Lingkup Badan PPSDMP

Dari total 2.848 pegawai Badan PPSDMP, terdapat 41 (empat puluh satu) kelompok Jabatan Fungsional. Nama jabatan fungsional dan jumlah aparat fungsional lingkup Badan PPSDMP pada tabel 1.





Tabel 1. Jabatan Fungsional dan Jumlah Aparat Fungsional lingkup Badan PPSDMP Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Analisis Anggaran	5	0,18%
2	Analisis Hukum	2	0,07%
3	Analisis Kebijakan	7	0,25%
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	46	1,62%
5	Analisis SDM Aparatur	62	2,18%
6	Arsiparis	94	3,30%
7	Asesor SDM Aparatur	11	0,39%
8	Asisten Ahli	79	2,77%
9	Calon Asisten Ahli	2	0,07%
10	Calon Guru	1	0,04%
11	Calon Pranata Laboratorium Pendidikan	1	0,04%
12	Calon Widyaiswara	1	0,04%
13	Guru	67	2,35%
14	Guru Besar	1	0,04%
15	Lektor	128	4,49%
16	Lektor Kepala	52	1,83%
17	Operator Laboratorium	4	0,14%
18	Operator Layanan Operasional	558	19,59%
19	Pamong Budaya	11	0,39%
20	Penata Kelola Sistem & Teknologi Informasi	10	0,35%
21	Penata Layanan Operasional	89	3,13%
22	Penata Penerbitan Ilmiah	4	0,14%
23	Penelaah Teknis Kebijakan	298	10,46%
24	Pengadministrasi Perkantoran	160	5,62%
25	Pengelola Layanan Operasional	25	0,88%
26	Pengelola Umum Operasional	79	2,77%
27	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	0,04%
28	Pengembang Teknologi Pembelajaran	30	1,05%
29	Pengolah Data Dan Informasi	305	10,71%
30	Penyuluh Pertanian	26	0,91%
31	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	3	0,11%
32	Perencana	80	2,81%
33	Pranata Hubungan Masyarakat	65	2,28%





No.	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
34	Pranata Keuangan APBN	29	1,02%
35	Pranata Komputer	58	2,04%
36	Pranata Laboratorium Pendidikan	132	4,63%
37	Pranata SDM Aparatur	9	0,32%
38	Pustakawan	77	2,70%
39	Statistisi	7	0,25%
40	Struktural	43	1,51%
41	Widyaiswara	186	1,51%
Total		2.848	100

Sumber Data: Sekretariat Badan, Tahun 2025

Persentase jumlah pegawai pada masing-masing kelompok jabatan fungsional **tertinggi** adalah pada jabatan fungsional operator layanan operasional yaitu 19,59% (558 orang), sedangkan yang **terendah** adalah pada Calon Guru, Calon Pranata Laboratorium Pendidikan, Calon Widyaiswara, Guru Besar, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu masing-masing 0,04%(1 orang).



Gambar 2. Peliputan Kegiatan Pelantikan Pejabat Administrator, Direktur PEPI, Pejabat Fungsional serta Pengukuhan Ketua Kelompok Substansi serta Ketua Tim Kerja Lingkup BPPSDMP di Jakarta Tanggal 16 September 2025





BAB III

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

A. VISI DAN MISI BADAN PPSDMP

1. Visi

Badan PPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2025-2029 yaitu “*Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045*”.

Berdasarkan visi Badan PPSDMP 2025 – 2029 di atas, terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri dan SDM pertanian sejahtera. Keempat kata kunci tersebut menjelaskan positioning SDM pertanian sebagai *human capital* untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian dan Visi Nasional.

2. Misi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi yaitu:

1. Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas Aset SDM Pertanian di masa yang akan datang.
2. Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian aset SDM Pertanian.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional.

B. TUJUAN

1. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani yang diukur melalui indikator Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas.
2. Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional yang diukur melalui indikator kinerja tata Kelola organisasi, meliputi:
 1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor;
 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPSDMP; dan
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPPSDMP.

C. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Birokrasi





Badan PPSDMP.

2. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani dengan indikator kinerja Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PPSDMP TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan, serta tata kelola birokrasi yang profesional. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan pertanian sekaligus memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Arah kebijakan BPPSDMP difokuskan pada dua pokok utama, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia dengan strategi:
 - a. Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (*human capital*) pertanian berbasis kompetensi
 - b. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif

Tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional dengan strategi: Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDMP dalam mewujudkan *good government & clean governance*

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PPSDMP TA 2025

Kinerja Badan PPSDMP tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan PPSDMP adalah :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik transparan dan akuntabel dengan Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP dengan target 0,7798 Indeks; dan
2. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani dengan Indikator Kinerja Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas dengan target 1,00%.





BAB IV

KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN

A. PAGU ANGGARAN BADAN PPSDMP TAHUN 2025

Pagu anggaran Kantor Pusat Badan BPPSDMP Tahun Anggaran Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 adalah **Rp865.394.963.000,-** yang dibagi dalam 2 (dua) Program Utama yaitu A. Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, dan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian; dan B. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Pagu anggaran Badan PPSDMP berdasarkan kegiatan utama tahun 2025 pada tabel 2. Rincian pagu anggaran Badan PPSDMP berdasarkan kegiatan utama tahun 2025 pada tabel 2.

Tabel 2. Pagu Anggaran Badan PPSDMP berdasarkan Kegiatan Program Utama Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	
		PAGU	PERSENTASE
A	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	561.706.039.000	64,91
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	74.166.442.000	8,57
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	106.324.426.000	12,29
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	380.015.759.000	43,91
4	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	1.199.412.000	0,14
B	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	303.688.924.000	35,09
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	303.688.924.000	35,09
	TOTAL	865.394.963.000	100,00

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

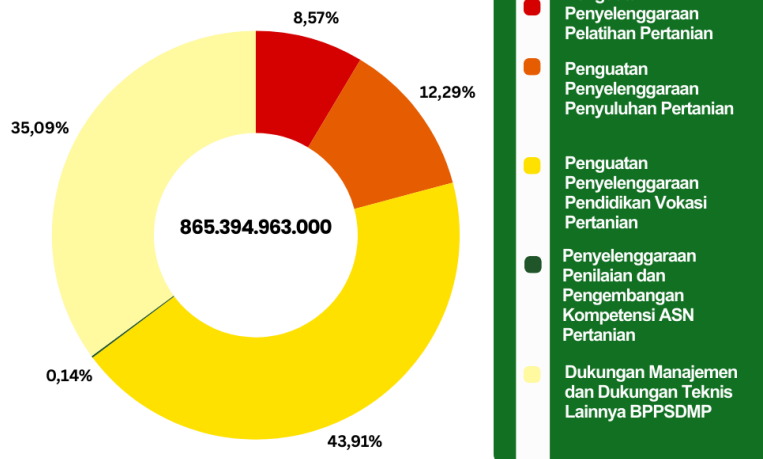




Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP berdasarkan masing-masing kegiatan utama sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 pada grafik 3.



PRESENTASE PAGU ANGGARAN



Grafik 3. Persentase Pagu Anggaran Badan PPSDMP Berdasarkan Kegiatan Program Utama Tahun 2025

Pagu anggaran Badan PPSDMP berdasarkan kegiatan utama sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 **tertinggi** adalah pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu 35,09%, sedangkan pagu anggaran **terendah** adalah pada Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian yaitu 0,14%

B. REALISASI ANGGARAN BADAN PPSDMP TAHUN 2025

Realisasi anggaran Badan PPSDMP berdasarkan kegiatan utama sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 yaitu Rp859.441.454.463 atau **99,31%** dari pagu sebesar Rp865.394.963.000. Rincian realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama Badan PPSDMP sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 pada tabel 3.





Tabel 3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Badan PPSDMP Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)		
		PAGU	REALISASI	%
A	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	561.706.039.000	559.584.832.381	99,62%
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	74.166.442.000	73.946.943.968	99,70%
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	106.324.426.000	106.218.411.901	99,90%
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	380.015.759.000	378.220.727.520	99,53%
4	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	1.199.412.000	1.198.748.992	99,94%
B	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	303.688.924.000	299.856.622.082	98,74%
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	303.688.924.000	299.856.622.082	98,74%
	Total	865.394.963.000	859.441.454.463	99,31%

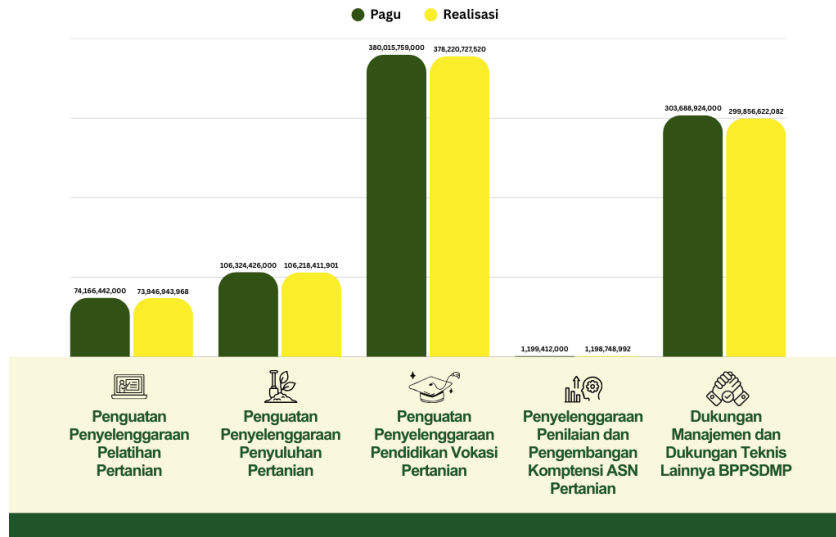
Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Realisasi anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Badan PPSDMP **tertinggi** adalah pada kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian yaitu Rp1.198.748.992 (99,94%) dari pagu Rp1.199.412.000, sedangkan realisasi anggaran **terendah** adalah pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP yaitu Rp299.856.622.082 (98,74%) dari pagu anggaran Rp303.688.924.000. Pagu dan Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama Badan PPSDMP sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 pada grafik 4.



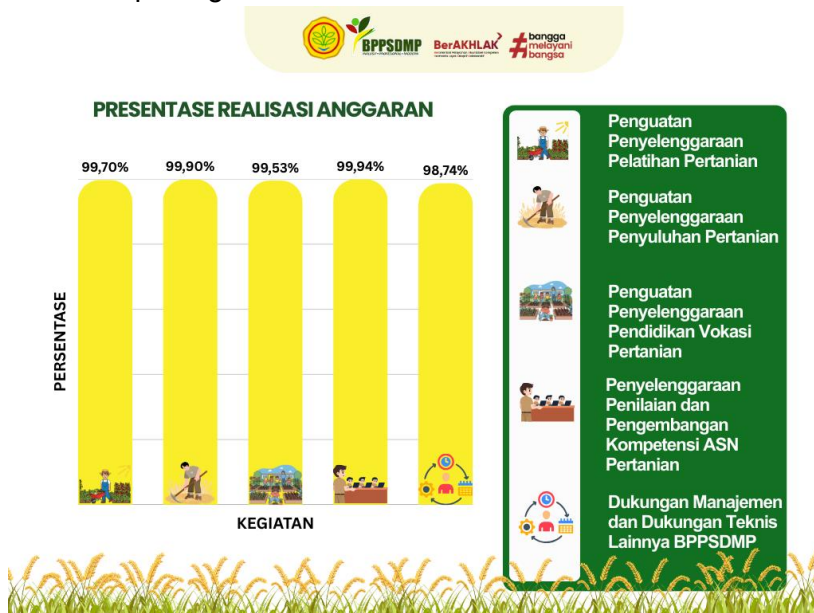


REALISASI ANGGARAN



Grafik 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Kantor Pusat BPPSDMP Tahun 2025

Persentase realisasi pagu anggaran Badan PPSDMP berdasarkan kegiatan utama Tahun 2025 pada grafik 5.



Grafik 5. Persentase Realisasi Pagu Anggaran Badan PPSDMP Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2025





C. REALISASI BELANJA BADAN PPSDMP

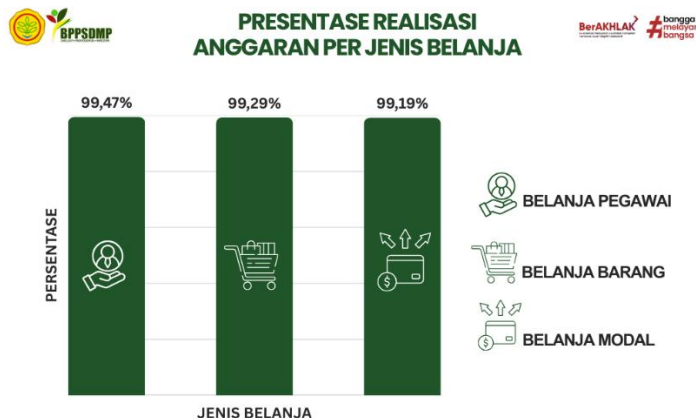
Realisasi anggaran belanja Badan PPSDMP sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 yaitu Rp859.441.454.463 atau **99,31%** dari Pagu Rp865.394.963.000. Rincian realisasi anggaran belanja Badan PPSDMP sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 pada pada tabel 4.

Tabel 4. Pagu Dan Realisasi Kegiatan Per Kewenangan Badan PPSDMP Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	162.839.328.000	161.968.501.248	99,47%
2	Belanja Barang	624.314.378.000	619.867.858.080	99,29%
3	Belanja Modal	78.241.257.000	77.605.095.135	99,19%
	Total	865.394.963.000	859.441.454.463	99,31%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Persentase realisasi anggaran belanja Badan PPSDMP sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 pada grafik 6.



Grafik 6. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Badan PPSDMP Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025

Persentase Realisasi anggaran belanja Badan PPSDMP sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025 yang **tertinggi** adalah pada Belanja Pegawai yaitu 99,47%, sedangkan yang **terendah** adalah pada Belanja Modal yaitu 99,19%.





D. REALISASI ANGGARAN KEWENANGAN BADAN PPSDMP

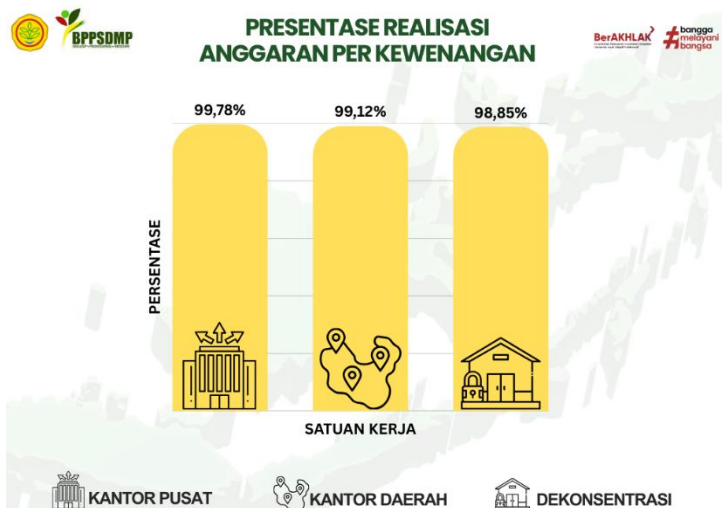
Realisasi anggaran kewenangan Badan PPSDMP sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 yaitu Rp859.441.454.463 atau **99,31%** dari Pagu Rp865.394.963.000. Rincian realisasi anggaran kewenangan Badan PPSDMP sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 pada tabel 5.

Tabel 5. Pagu Dan Realisasi Kewenangan Badan PPSDMP Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Kantor Pusat	256.271.182.000	255.695.210.662	99,78%
2	Kantor Daerah	603.423.781.000	598.111.998.976	99,12%
3	Dekonsentrasi	5.700.000.000	5.634.244.825	98,85%
	TOTAL	865.394.963.000	859.441.454.463	99,31%

Sumber Data: Sekretariat Badan Bulan Desember Tahun 2025

Persentase realisasi anggaran kewenangan Badan PPSDMP Tahun 2025 di grafik 7.



Grafik 7. Persentase Realisasi Anggaran Kewenangan Badan PPSDMP Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025

Persentase realisasi anggaran belanja **tertinggi** adalah pada Kantor Pusat yaitu 99,78%, sedangkan persentase realisasi anggaran belanja **terendah** adalah pada Dekonsentrasi yaitu 98,85%.





E. REALISASI ANGGARAN SATKER KANTOR PUSAT TAHUN 2025

Realisasi anggaran satker kantor pusat Tahun 2025 adalah Rp257.649.996.936 (**99,78%**) dari pagu anggaran Rp258.226.805.000. Rincian realisasi satker Kantor Pusat tahun 2025 di tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Satker Kantor Pusat Tahun 2025

No	Eselon II	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Pusat Pelatihan Pertanian	19.222.604.000	19.127.095.492	99,50%
2	Pusat Penyuluhan Pertanian	100.624.426.000	100.584.167.076	99,96%
3	Pusat Pendidikan Pertanian	90.402.701.000	90.161.555.763	99,73%
4	Sekretariat Badan PPSDMP	46.021.451.000	45.822.392.331	99,57%
5	Pusat Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian	1.955.623.000	1.954.786.274	99,96%
	TOTAL	258.226.805.000	257.649.996.936	99,78%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Persentase realisasi anggaran satker kantor pusat Tahun 2025 yang **tertinggi** adalah pada Pusat Penyuluhan Pertanian yaitu **99,96%**, sedangkan yang **terendah** adalah pada Pusat Pelatihan Pertanian yaitu **99,50%**.

F. REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PELATIHAN PERTANIAN TAHUN 2025

Realisasi anggaran satker kantor daerah/UPT Pelatihan Pertanian tahun 2025 adalah Rp156.217.746.685 (**99,52%**) dari pagu anggaran Rp156.974.435.000. Rincian realisasi satker Kantor Daerah/UPT Pelatihan Pertanian tahun 2025 pada tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Satker Kantor Daerah/UPT Pelatihan Pertanian Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	13.624.576.000	13.607.069.417	99,87%
2	Balai Besar Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi, Jawa Barat	27.848.971.000	27.832.019.317	99,94%





No	Satuan Kerja	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
3	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan	11.255.697.000	11.140.783.818	98,98%
4	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, Jawa Timur	12.879.168.000	12.870.020.987	99,93%
5	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, Sulawesi Selatan	13.359.952.000	12.927.940.168	96,77%
6	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Malang, Jawa Timur	15.416.844.000	15.377.049.411	99,74%
7	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Jawa Barat	17.116.423.000	17.072.785.561	99,75%
8	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	10.255.036.000	10.254.038.537	99,99%
9	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, Jawa Barat	11.059.202.000	11.041.603.524	99,84%
10	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Nusa Tenggara Timur	24.158.566.000	24.094.435.945	99,73%
TOTAL		156.974.435.000	156.217.746.685	99,52%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Realisasi anggaran satker kantor daerah/UPT Pelatihan Pertanian tahun 2025 yang **tertinggi** adalah pada Balai Pelatihan Pertanian Jambi yaitu Rp10.254.038.537 (99,99%) dari pagu Rp10.255.036.000, sedangkan realisasi satker kantor daerah/UPT Pelatihan Pertanian tahun 2025 yang **terendah** adalah Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku Sulawesi Selatan yaitu Rp12.927.940.168 (96,77%) dari pagu Rp13.359.952.000.

G. REALISASI ANGGARAN SATKER KANTOR DAERAH/UPT PENDIDIKAN PERTANIAN TAHUN 2025

Realisasi anggaran satker kantor daerah/UPT Pendidikan Pertanian tahun 2025 adalah Rp423.557.687.474 (**99,43%**) dari pagu anggaran Rp425.978.326.000. Rincian realisasi satker Kantor Daerah/UPT Pendidikan Pertanian tahun 2025 pada tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Satker Kantor Daerah/UPT Pendidikan Pertanian Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia Banten (PEPI)	18.816.619.000	18.651.474.147	99,12%
2	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Bogor	51.277.448.000	51.046.823.563	99,55%





No	Satuan Kerja	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
3	Politeknik Pembangunan Pertanian(Polbangtan)Yogyakarta - Magelang Kampus Magelang	25.904.794.000	25.735.741.463	99,35%
4	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang Kampus Yogyakarta	27.779.803.000	27.679.332.328	99,64%
5	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Malang	51.810.875.000	51.280.141.087	98,98%
6	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Medan	38.822.312.000	38.557.631.379	99,32%
7	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Gowa	102.776.159.000	102.059.677.766	99,30%
8	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Manokwari	27.394.279.000	27.344.429.862	99,82%
9	Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, Palembang	32.464.804.000	32.405.468.175	99,82%
10	Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan	38.078.800.000	38.035.688.777	99,89%
11	Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kupang, NTT	10.852.433.000	10.761.278.927	99,16%
TOTAL		425.978.326.000	423.557.687.474	99,43%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Realisasi Satker UPT Pendidikan Pertanian tahun 2025 yang **tertinggi** adalah pada Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru Kalimantan Selatan yaitu Rp38.035.688.777 (**99,89%**) dari pagu Rp38.078.800.000, sedangkan realisasi satker kantor daerah/UPT Pendidikan Pertanian tahun 2025 yang **terendah** adalah pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang yaitu Rp51.280.141.087 (**98,98%**) dari pagu Rp51.810.875.000.

H. REALISASI ANGGARAN SATKER DEKONSENTRASI TAHUN 2025

Total realisasi anggaran satker Dekonsentrasi pada tahun 2025 adalah Rp5.634.244.825 (**98,85%**) dari pagu Rp5.700.000.000. Rincian realisasi anggaran satker Dekonsentrasi pada tabel 9.





Tabel 9. Realisasi Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	95.470.000	95.420.780	99,95%
2	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	192.380.000	191.599.180	99,59%
3	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY	129.270.000	128.278.024	99,23%
4	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	184.530.000	183.268.474	99,32%
5	Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	128.720.000	127.381.500	98,96%
6	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	145.050.000	143.729.448	99,09%
7	Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	137.040.000	134.840.366	98,39%
8	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	139.334.000	137.983.780	99,03%
9	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	168.820.000	168.370.955	99,73%
10	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	126.220.000	124.600.000	98,72%
11	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	146.525.000	146.504.183	99,99%
12	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	115.730.000	106.260.000	91,82%
13	Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat	94.650.000	94.645.000	99,99%
14	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	116.250.000	112.937.700	97,15%
15	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	121.390.000	121.390.000	100,00%
16	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	113.710.000	113.709.900	100,00%
17	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	156.670.000	154.677.300	98,73%





No	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
18	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	127.970.000	127.970.000	100,00%
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	114.600.000	114.557.594	99,96%
20	Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara	148.630.000	148.602.000	99,98%
21	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Aceh	358.584.000	358.454.545	99,96%
22	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	225.542.000	225.519.433	99,99%
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	147.230.000	145.766.000	99,01%
24	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	162.630.000	162.260.000	99,77%
25	Dinas Pertanian Provinsi Banten	130.590.000	130.590.000	100,00%
26	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	242.160.000	242.113.208	99,98%
27	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	158.914.000	158.320.000	99,63%
28	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	155.299.000	154.879.078	99,73%
29	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Pangan Provinsi Papua	173.162.000	157.082.000	90,71%
30	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	111.800.000	111.685.281	99,90%
31	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	155.840.000	155.807.360	99,98%
32	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	223.470.000	223.462.700	100,00%
33	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	126.250.000	126.250.000	100,00%





No	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
34	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	138.260.000	138.250.000	99,99%
35	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	102.730.000	96.962.718	94,39%
36	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	134.020.000	127.420.000	95,08%
37	Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	125.610.000	117.746.318	93,74%
38	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	124.950.000	124.950.000	100,00%
TOTAL		5.700.000.000	5.634.244.825	98,85%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Realisasi satker dekonsentrasi tahun 2025 yang **tertinggi** adalah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan masing-masing realisasi yaitu **100%**, sedangkan realisasi satker dekonsentrasi tahun 2025 yang **terendah** adalah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua yaitu **90,71%**.

I. REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT KEGIATAN TAHUN 2025

Rincian realisasi anggaran per output kegiatan dari Program Pendidikan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

a. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Total realisasi anggaran per output pada kegiatan penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian tahun 2025 yaitu Rp73.946.943.968 **(99,70%)** dari pagu Rp74.166.442.000. Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2025 pada tabel 10.





Tabel 10. Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Pagu	Realisasi	%
1	Koordinasi	Kegiatan	5.158.713.000	5.151.851.708	99,87%
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	9.000.000.000	8.997.470.471	99,97%
3	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	6.705.889.000	6.634.103.171	98,93%
4	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	15.000.000.000	14.994.284.905	99,96%
5	Sertifikasi Profesi dan SDM	Orang	523.045.000	520.528.609	99,52%
6	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat	10.000.000.000	9.907.021.021	99,07%
7	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	Orang	27.778.795.000	27.741.684.083	99,87%
Total			74.166.442.000	73.946.943.968	99,70%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Realisasi anggaran per output pada kegiatan penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian tahun 2025 **tertinggi** adalah pada Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria yaitu Rp8.997.470.471 (99,97%) dari pagu Rp9.000.000.000, sedangkan yang **terendah** adalah pada Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup yaitu Rp6.634.103.171 (98,93%) dari pagu Rp6.705.889.000. Persentase realisasi anggaran per output pada kegiatan penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian tahun 2025 pada grafik 8.

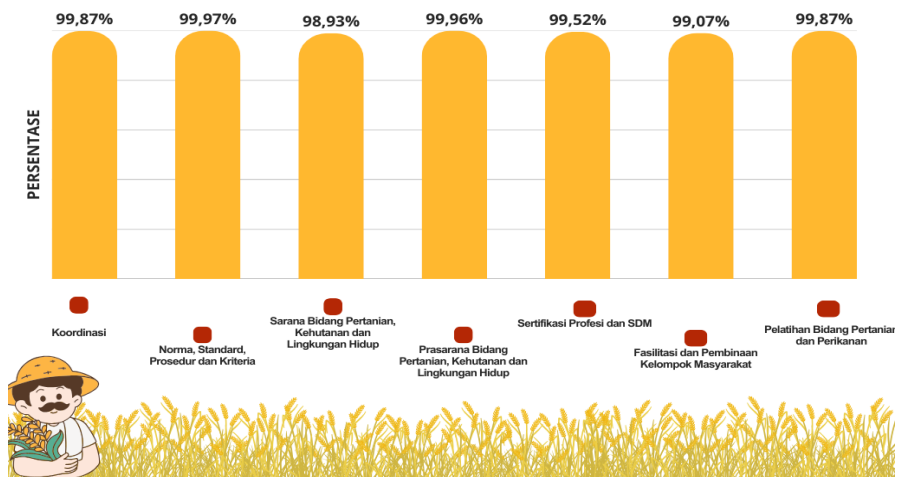




PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN OUTPUT KEGIATAN



Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian



Grafik 8. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2025

b. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Total realisasi anggaran per output kegiatan pada kegiatan penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2025 yaitu Rp106.218.411.901 (**99,90%**) dari pagu Rp106.324.426.000. Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025 pada tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Pagu	Realisasi	%
1	Koordinasi	Kegiatan	20.387.838.000	20.351.705.009	99,82%
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah	27.700.000.000	27.633.077.358	99,76%
3	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	58.236.588.000	58.233.629.534	99,99%
Total			106.324.426.000	106.218.411.901	99,90%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Realisasi anggaran per output pada kegiatan penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2025 **tertinggi** adalah pada Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN) yaitu Rp58.223.629.534 (99,99%) dari pagu Rp58.236.588.000, sedangkan yang **terendah** adalah pada Koordinasi dan

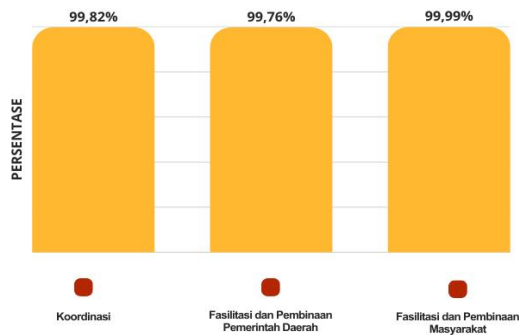




Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah yaitu 99,76%. Persentase realisasi anggaran per output pada kegiatan penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2025 pada grafik 9.



**PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
BERDASARKAN OUTPUT KEGIATAN**
Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian



Grafik 9. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025

c. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian

Total realisasi anggaran per output kegiatan pada kegiatan penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian tahun 2025 yaitu Rp378.220.727.520 **(99,53%)** dari pagu Rp380.015.759.000. Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2025 pada tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Pagu	Realisasi	%
1	Koordinasi	Kegiatan	5.749.999.000	5.734.991.808	99,74%
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	10.000.000.000	9.976.694.613	99,77%
3	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Orang	128.810.000.000	128.514.920.389	99,77%

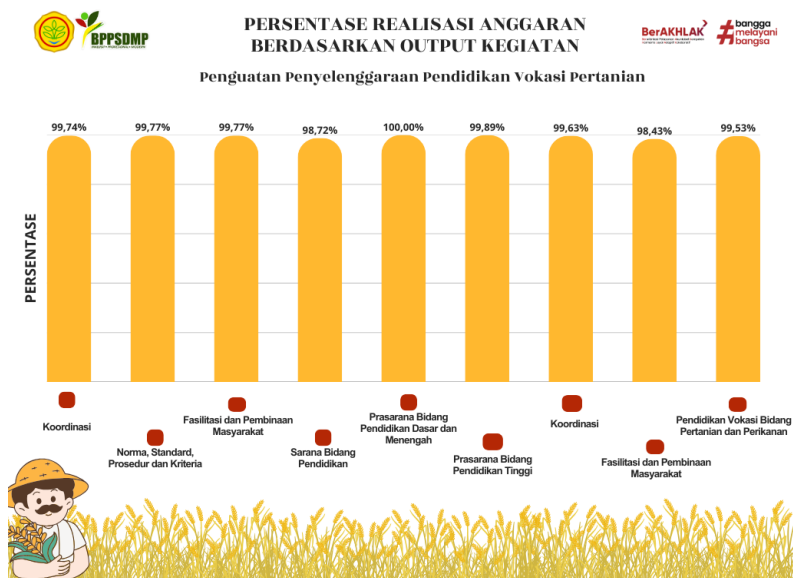




No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Pagu	Realisasi	%
4	Sarana Bidang Pendidikan	Unit	3.560.505.000	3.515.036.149	98,72%
5	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Unit	228.000.000	227.995.000	100,00%
6	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	35.000.000.000	34.962.572.700	99,89%
7	Koordinasi	Kegiatan	16.464.058.000	16.402.827.389	99,63%
8	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Orang	42.473.854.000	41.807.028.820	98,43%
9	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	Orang	137.729.343.000	137.078.660.652	99,53%
Total			380.015.759.000	378.220.727.520	99,53%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Realisasi anggaran per output pada kegiatan penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian tahun 2025 **tertinggi** adalah pada Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Rp227.995.000 (100,00%) dari pagu Rp228.000.000, sedangkan yang **terendah** adalah pada Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat yaitu Rp41.807.028.820 (98,43%) dari pagu Rp42.473.854.000. Persentase realisasi anggaran per output pada kegiatan penguatan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi tahun 2025 pada grafik 10.



Grafik 10. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 2025





d. Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

Total realisasi anggaran per output kegiatan pada kegiatan penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian tahun 2025 yaitu Rp1.198.748.992 **(99,94%)** dari pagu Rp1.199.412.000. Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2025 pada tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Pagu	Realisasi	%
1	Koordinasi	Kegiatan	965.794.000	965.135.992	99,93%
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	18.975.000	18.970.000	99,97%
3	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	57.143.000	57.143.000	100,00%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Orang	157.500.000	157.500.000	100,00%
Total			1.199.412.000	1.198.748.992	99,94%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Realisasi anggaran per output pada kegiatan penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian tahun 2025 **tertinggi** adalah pada Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara masing-masing 100,00%. Sedangkan yang **terendah** adalah pada Koordinasi yaitu Rp965.135.992 (99,94%) dari pagu Rp965.794.000. Persentase realisasi anggaran per output pada kegiatan penguatan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi tahun 2025 pada grafik 11.

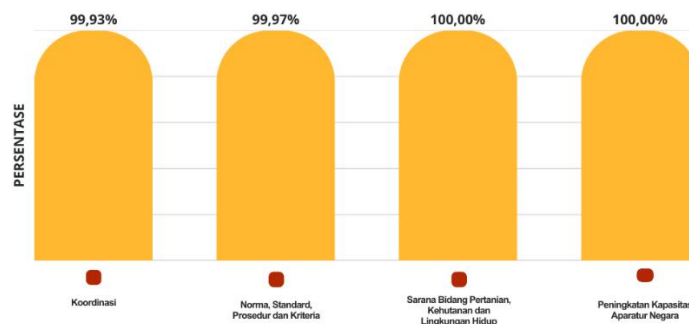




**PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
BERDASARKAN OUTPUT KEGIATAN**



Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian



Grafik 11. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pada Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 2025

2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Total realisasi anggaran per output kegiatan pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2025 yaitu Rp298.856.662.082 **(98,74%)** dari pagu Rp303.688.924.000. Realisasi Anggaran Per Output Pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2025 pada tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Per Output Pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Pagu	Realisasi	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Dokumen	266.224.560.000	264.341.925.205	99,29%
2	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang	14.029.493.000	14.024.418.640	99,96%
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	14.229.757.000	14.137.667.426	99,35%
4	Koordinasi	Kegiatan	452.905.000	167.752.615	37,04%
5	Pelayanan publik kepada masyarakat	Orang	4.670.906.000	3.108.525.228	66,55%
6	Pelayanan publik kepada lembaga	Lembaga	131.372.000	131.351.301	99,98%

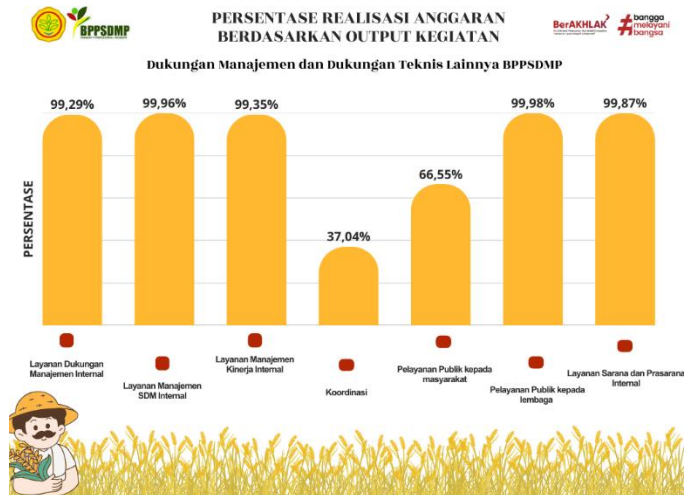




No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Pagu	Realisasi	%
7	Layanan sarana dan prasarana internal	Unit	3.949.931.000	3.944.981.667	99,87%
Total			303.688.924.000	299.856.622.082	98,74%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Bulan Desember Tahun 2025

Realisasi anggaran per output pada dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2025 **tertinggi** adalah pada Pelayanan Publik Kepada Lembaga yaitu Rp131.351.301 (99,98%) dari pagu Rp131.372.000, sedangkan yang **terendah** adalah pada Koordinasi yaitu Rp167.752.615 (37,04%) dari pagu Rp452.905.000. Persentase realisasi anggaran per output pada dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2025 pada grafik 12.



Grafik 12. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pada Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2025





BAB V

CAPAIAN FISIK BADAN PPSDMP SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Program kegiatan Badan PPSDMP tahun 2025 yaitu dari Program Pendidikan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen. Capaian fisik per output kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENDIDIKAN PELATIHAN VOKASI TAHUN 2025

1. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian tahun 2025 rata-rata **mencapai 100,00%**. Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian tahun 2025 pada tabel 15.

Tabel 15. Capaian Fisik Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan
Pelatihan Pertanian Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi	Kegiatan	10	10	100,00%
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	6	6	100,00%
3	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	11	11	100,00%
4	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	1	1	100,00%
5	Sertifikasi Profesi dan SDM	Orang	251	251	100,00%
6	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masy.	1.691	1.691	100,00%
7	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	Orang	74.588	74.584	99,99%
	Rata-rata				100,00%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Tahun 2025

Persentase capaian fisik output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2025 tertinggi adalah pada Koordinasi, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sertifikasi Profesi dan SDMI dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat yaitu masing-masing 100%, sedangkan yang terendah ada pada Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan yaitu 99,99%.





2. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025 telah tercapai seluruhnya **100,00%**. Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2025 pada tabel 16.

Tabel 16. Capaian Fisik Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi	Kegiatan	6	6	100,00%
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah	39	39	100,00%
3	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	10.510	10,510	100,00%
	Rata-rata				100,00%

Sumber Data: Sekretariat Badan, tahun 2025

Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2025, adalah 100,00% pada seluruh Rincian Output.

3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian

Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian tahun 2025 rata-rata **102,32%**. Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian tahun 2025 pada tabel 17.

Tabel 17. Capaian Fisik Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi	Kegiatan	8	8	100,00%
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	6	6	100,00%
3	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Orang	83.780	85.691	102,28%
4	Sarana Bidang Pendidikan	Unit	11	11	100,00%
5	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Unit	1	1	100,00%
6	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	1	1	100,00%





No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
7	Koordinasi	Kegiatan	1	1	100,00%
8	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Orang	10.000	11.860	118,60%
9	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	Orang	6.847	6.847	100,00%
	Rata-rata				102,32%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Tahun 2025

Persentase capaian fisik output kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian tahun 2025, tertinggi adalah pada Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat yaitu 118,60% atau melebihi target dan pada rincian output lainnya telah terealisasi seluruhnya yaitu 100,00%.

4. Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

Persentase capaian fisik output kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tahun 2025 rata-rata **100,00%** atau telah tercapai seluruhnya. Persentase capaian fisik output kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tahun 2025 pada tabel 18.

Tabel 18. Capaian Fisik Output Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi	Kegiatan	1	1	100,00%
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	2	2	100,00%
3	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	3	3	100,00%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Orang	10	10	100,00%
	Rata-rata				100,00%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Tahun 2025

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2025

Persentase capaian fisik output kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2025 rata-rata **100,00%** atau telah tercapai seluruhnya. Persentase capaian





fisik output kegiatan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2025 pada tabel 19.

Tabel 19. Capaian Fisik Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	32	32	100,00%
2	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang	1.311	1.311	100,00%
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	47	47	100,00%
4	Koordinasi	Kegiatan	2	2	100,00%
5	Pelayanan publik kepada masyarakat	Orang	152.200	152.200	100,00%
6	Pelayanan publik kepada lembaga	Lembaga	6	6	100,00%
7	Layanan sarana dan prasarana internal	Unit	261	261	100,00%
	Rata-rata				100,00%

Sumber Data: Sekretariat Badan, Tahun 2025





BAB VI

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PPSDMP TAHUN 2025

A. CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA BADAN PPSDMP TAHUN 2025

Ketersediaan pangan global saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim El Nino dan La Nina, konflik geopolitik, serta kebijakan pembatasan ekspor menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan drastis dalam ketersediaan pangan dunia. Tantangan ketersediaan pangan masa depan di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak untuk diatasi. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030-2040, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 297 juta, negara ini akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh warganya. Peningkatan produksi padi diharapkan dapat menjawab tantangan semakin meningkatnya kebutuhan pangan nasional dari tahun ke tahun. Adapun peningkatan produksi padi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman padi yang berkelanjutan dan efisien melalui pengembangan Pertanian Modern.

Capaian Program Kegiatan Utama Badan PPSDMP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Brigade Pangan (BP)

Program Brigade Pangan merupakan kebijakan strategis BPPSDMP untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan peran petani milenial sebagai motor penggerak agribisnis modern. Program ini diarahkan pada pengelolaan usaha tani padi berbasis teknologi dan kelembagaan ekonomi yang profesional, terutama di lokasi Optimasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah. Pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, penyuluh, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat, dengan tujuan meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan pendapatan petani secara berkelanjutan.

Model bisnis Brigade Pangan (BP) merupakan skema kemitraan usaha tani yang memadukan penyediaan sarana produksi, penggunaan alsintan modern, serta manajemen budidaya pada lahan Oplah maupun CSR. Proses bisnis diawali dengan penetapan kelembagaan petani sebagai operator serta penegasan pola kerja sama dengan pemilik lahan. Penerapan BP diarahkan untuk meningkatkan intensitas tanam dari IP rendah menuju IP tinggi serta mendorong produktivitas selama musim tanam dengan capaian yang secara teknis dapat mencapai lebih dari 5 ton per hektare pada komoditas padi.





Berdasarkan simulasi operasional pada luasan sekitar 200 hektare, usaha tani dapat menghasilkan omzet dalam kisaran miliaran rupiah per musim tanam dengan struktur biaya yang relatif efisien melalui pemanfaatan alsintan. Ilustrasi pembagian keuntungan memperlihatkan bahwa skema bagi hasil 70 persen bagi operator BP dan 30 persen bagi pemilik lahan dapat memberikan nilai usaha yang signifikan bagi kedua pihak. Selain itu, operator juga memperoleh pendapatan tambahan dari usaha alsintan sehingga memperkuat kelayakan finansial model dan meningkatkan daya tarik usaha tani bagi petani muda.

Pembentukan Brigade Pangan (BP)

Pada Tahun 2024 target BP adalah berjumlah 1.755 BP pada Lokasi OPLAH 2024 di 12 Provinsi antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Capaian Pembentukan Brigade Pangan dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Capaian Pembentukan Brigade Pangan OPLAH 2024

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Aceh	59	59	100,00%
2	Sumatera Utara	152	160	105,26%
3	Riau	17	18	105,88%
4	Jambi	69	69	100,00%
5	Sumatera Selatan	338	326	96,45%
6	Lampung	141	140	99,29%
7	Kep. Bangka Belitung	51	48	94,12%
8	Kalimantan Barat	196	204	104,08%
9	Kalimantan Tengah	255	258	101,18%
10	Kalimantan Selatan	209	208	99,52%
11	Sulawesi Selatan	68	71	104,41%
12	Papua Selatan	200	210	105,00%
Total		1.755	1.771	100,91%

Sumber Data: Badan PPSDMP, Tahun 2025

tabel di atas secara keseluruhan berhasil mencapai target dengan realisasi 1.771 unit (100,91%), sebanyak 8 provinsi telah melebihi target dan 4 provinsi belum mencapai target. Sumatera Selatan memiliki beban target paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Meskipun persentasenya di bawah 100%, secara hasil mereka menyumbang realisasi terbanyak 326 unit.

Pada tahun 2025 target BP adalah berjumlah 2.059 BP pada Lokasi OPLAH dan 612 BP pada Lokasi CSR. Lokasi Brigade Pangan (BP)





terdapat di 24 (dua puluh empat) Provinsi meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara. Progres capaian Brigade Pangan s.d 31 Desember 2025 yang telah terbentuk pada Lokasi OPLAH adalah 2.079 BP atau 100,97% dan 513 BP pada Lokasi CSR atau 83,92%%. Capaian Brigade Pangan Per Provinsi dapat dilihat pada pada tabel 21.

Tabel 21. Capaian Pembentukan Brigade Pangan 2025 s.d 31 Desember 2025

DATA BRIGADE PANGAN 2025 BERDASARKAN APLIKASI

NO	PROVINSI	TARGET BP		REALISASI BP		PERSENTASE	
		OPLAH	CSR	OPLAH	CSR	OPLAH	CSR
1	Aceh	93	-	99	-	106.45%	-
2	Sumatera Utara	233	-	233	-	100.00%	-
3	Sumatera Barat	124	-	125	-	100.81%	-
4	Riau	90	3	90	3	100.00%	100.00%
5	Jambi	38	5	38	5	100.00%	100.00%
6	Sumatera Selatan	242	167	242	167	100.00%	100.00%
7	Bengkulu	53	7	53	7	100.00%	100.00%
8	Lampung	96	-	98	-	102.08%	-
9	Jawa Barat	98	-	98	-	100.00%	-
10	Jawa Tengah	58	-	58	-	100.00%	-
11	Jawa Timur	88	-	95	-	107.95%	-
12	Banten	39	-	41	-	105.13%	-
13	Nusa Tenggara Barat	50	-	50	-	100.00%	-
14	Nusa Tenggara Timur	81	1	81	1	100.00%	100.00%
15	Kalimantan Barat	105	12	105	14	100.00%	116.67%
16	Kalimantan Tengah	10	100	10	73	100.00%	73.00%
17	Kalimantan Selatan	95	78	95	78	100.00%	100.00%
18	Kalimantan Timur	69	-	70	-	101.45%	-
19	Kalimantan Utara	50	1	51	1	102.00%	100.00%
20	Sulawesi Tengah	-	12	-	12	-	100.00%
21	Sulawesi Selatan	306	32	306	32	100.00%	100.00%
22	Sulawesi Barat	-	5	-	5	-	100.00%
23	Papua Selatan	41	87	41	87	100.00%	100.00%
24	Sulawesi Tenggara	-	34	-	28	-	82.35%
TOTAL		2,059	612	2,079	513	100.97%	83.82%

Update: 31-Dec-25
Pukul 16.00 WIB

	> 80%
	60% s.d. 80%
	< 60%
	Tidak ada target BP

Catatan:

- 1 Target BP Oplah berdasarkan Kepmentan Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 & Konfirmasi PJ (sesuai kondisi lapangan)
- 2 Target BP CSR berdasarkan Realisasi Kontrak Konstruksi per 31 Desember 2025 Ditjen LIP & Konfirmasi PJ (sesuai kondisi lapangan)
- 3 Realisasi BP Oplah dan CSR dihitung berdasarkan BP yang sudah mengupload SK Penetapan

Sumber: Badan PPSDMP, Tahun 2025

Berdasarkan data Brigade Pangan 2025 yang tercatat, realisasi pembentukan BP pada lahan Oplah menunjukkan capaian yang secara umum telah melampaui target. Pada sebagian besar provinsi, realisasi pembentukan BP pada lahan Oplah mencapai atau mendekati target, bahkan pada sejumlah provinsi berada di atas 100 persen. Hal ini mengindikasikan respons positif





dan kesiapan kelembagaan petani terhadap model operasi Brigade Pangan, termasuk dalam proses verifikasi dan penetapan lahan.

Pada skema CSR, capaian realisasi juga menunjukkan performa yang relatif baik pada beberapa provinsi yang memiliki alokasi CSR, meskipun terdapat variasi capaian antar wilayah. Variasi tersebut mencerminkan perbedaan kesiapan pelaku CSR, ketersediaan lahan, serta mekanisme kemitraan yang masih memerlukan penguatan di daerah tertentu. Secara keseluruhan, capaian realisasi BP pada Oplah dan CSR berada dalam kisaran tinggi, dengan persentase yang menunjukkan kinerja positif dalam tahap awal implementasi Brigade Pangan.

Hasil ini memberikan indikasi bahwa desain kelembagaan BP dapat diadopsi dengan cepat oleh daerah, baik pada lahan Oplah maupun CSR, serta memberikan peluang percepatan bagi konsolidasi kelembagaan, peningkatan luas garap, dan penguatan basis data lokasi BP untuk musim tanam berikutnya. Variasi antar provinsi menjadi dasar untuk penajaman strategi pendampingan, dukungan teknis, serta pola kemitraan pada fase implementasi lanjutan.

B. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDMP

1. Capaian Kegiatan Utama Sekretariat Badan Tahun 2025

Kegiatan utama Sekretariat Badan meliputi:

a. Pembinaan Pegawai Lingkup BPPSDMP

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, disiplin, etika, dan kinerja untuk menciptakan SDM berkualitas. Output dari kegiatan ini berupa peningkatan produktivitas, kepatuhan terhadap peraturan, loyalitas, serta terciptanya budaya organisasi yang profesional dan berkinerja tinggi.





Gambar 3. Pembinaan Pegawai lingkup BPPSDMP di Gedung Bina Karakter BBPMKP Ciawi, Tanggal 18 Mei 2025

b. Bimbingan Teknis Produksi Video Kreatif "Strategi Penyajian Informasi Pertanian Dan Optimalisasi Konten Digital Secara Menarik Dan Informatif"

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola kehumasan masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis dalam memproduksi konten video. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan pengelola kehumasan unit kerja dalam memproduksi konten video. Kegiatan ini menghadirkan berapa narasumber antara lain Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian dan Rodja TV.



Gambar 4. Bimbingan Teknis Produksi Video Kreatif Strategi Penyajian Informasi Pertanian dan Optimalisasi Konten Digital Secara Menarik dan Informatif di Mess SDM Jakarta, Tanggal 26-27 November 2025





c. **Reviu APIP dan Penelaahan RKA-K/L TA.2025. Reviu APIP Revisi Pengutamaan Anggaran Untuk Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Berupa Pergeseran Anggaran Ke Rincian Output (RO) dan Melakukan Blokir Kode A**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan prioritas Direktif Presiden berupa Pergeseran Anggaran ke Rincian Output (RO) dan Memblokir Kode A. Output dari kegiatan ini adalah Sekretaris Badan PPSDMP menginstruksikan Kelompok Substansi Perencanaan Badan PPSDMP untuk segera memproses pengajuan Pergeseran Anggaran anggaran ke Rincian Output (RO) dan melakukan Blokir Kode A dalam rangka Pengutamaan Anggaran untuk Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden lingkup BPPSDMP ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.



Gambar 5. Reviu APIP dan Penelaahan RKA-K/L TA.2025 di RR.Oval Kantor BPPSDMP Jakarta Tanggal 17-18 Desember 2025

d. **Entry Meeting Pengawasan Aset Lingkup BPPSDMP Dalam Rangka Penatausahaan Aset Pusat Badan PPSDMP (Selain Kendaraan Bermotor)**

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penatausahaan aset non kendaraan berjalan akurat, tertib, dan siap digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Output dari kegiatan ini adalah konsistensi data antara SAKTI modul BMN dan laporan fisik di lapangan, sinkronisasi nilai aset, kode barang, dan tahun perolehan untuk menghindari selisih pada neraca, serta Penyiapan dokumen pendukung belanja modal yang masih kurang lengkap, terutama BAST, spesifikasi teknis, dan kontrak.





Gambar 6. Entry Meeting Pengawasan aset lingkup BPPSDMP Dalam Rangka Penatausahaan Aset Pusat Badan PPSDMP di Kantor BPPSDMP Jakarta, Tanggal 17 November 2025

e. Rapat Pimpinan Lingkup Badan PPSDMP – RAPIM B

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Capaian Kegiatan dan Realisasi Anggaran BPPSDMP pada tahun 2025 serta Rencana Kegiatan BPPSDMP pada tahun 2026. Output dari kegiatan ini adalah kesiapan implementasi program Tahun 2026 agar target kinerja dan kebijakan strategis peningkatan kapasitas SDM pertanian dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan, serta BPPSDMP dapat mendukung program Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian yaitu Swasembada Pangan.



Gambar 7. Rapat Pimpinan Lingkup Badan PPSDMP – RAPIM B di Aula Bina





Karakter BBPMKP Ciawi, Tanggal 03 Desember 2025 naikan ke hal sblmnya

f. Pertemuan Verifikasi Dan Validasi Data Untuk Penyusunan Buku Statistik Pertanian

Kegiatan ini menghasilkan Keputusan Penyusunan Buku Statistik Pertanian berisi tentang Iklim, OPT, DPI, Sarana Pertanian, SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun 2025, dengan sumber data mulai tahun 2023 s.d 2025. Untuk tahun 2025 disepakati menggunakan data s.d. Oktober 2025. Data yang diverifikasi dan divalidasi oleh Pusdatin untuk penyusunan Buku Statistik dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah Data Kelembagaan Petani dan Ketenagaan Penyuluh sampai dengan Semester I Tahun 2025 serta Perkembangan Data Kelembagaan Petani dan Ketenagaan Penyuluh sampai dengan Semester I Tahun 2025 yaitu Jumlah Kelembagaan Petani, Jumlah Kelompok Tani (765.812 unit) Jumlah Gabungan Kelompok Tani (64.751 unit) dan Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (14.497 unit).

2. Capaian Kegiatan Sekretariat Badan PPSDMP Lainnya

Kegiatan Sekretariat Badan lainnya meliputi:

a. Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI Dengan Menteri Pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bersama guna merumuskan kebijakan, mengevaluasi program kerja, serta membahas anggaran kementerian/lembaga agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Output dari kegiatan ini adalah Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana kerja dan program agar fokus pada peningkatan produksi komoditas pertanian yang berdampak langsung kepada petani guna mendukung swasembada pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

b. Pembahasan Perpindahan Gaji Penyuluh Pertanian Tahap Pertama

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis antar-unit diselenggarakan, mencakup alur administrasi, kebutuhan dokumen, dan mekanisme verifikasi data. Output dari kegiatan ini adalah disusun berupa daftar penyuluh yang datanya telah lengkap serta daftar yang memerlukan perbaikan maupun yang belum mengirimkan data dan komitmen bersama untuk menyelesaikan tahapan lanjutan dan memastikan perpindahan gaji dapat diselesaikan tepat waktu.





Gambar 8. Pembahasan Perpindahan Gaji Penyuluh Pertanian Tahap Pertama di Hotel Bumi Wiyata Depok, Tanggal 13-15 November 2025

C. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN TAHUN 2025

1. Capaian Kegiatan Utama Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2025

Capaian Kegiatan Utama pada Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2025 meliputi:

a. Pemberdayaan masyarakat melalui program READ-SI

Program READSI merupakan pengembangan (*scaling-up*) Program *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ) yang telah dilaksanakan selama 6 tahun (2008- 2014) di 5 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dan Program Replikasi READ yang telah dilaksanakan selama 3 tahun (2015 – 2017) di 4 Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Program READ dinilai sebagai program sukses Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan IFAD dalam menurunkan angka kemiskinan petani. Tujuan jangka panjang Program READSI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani miskin di daerah di mana Program READSI berada (6 Provinsi dan 18 Kabupaten). Tujuan jangka pendek program READSI adalah untuk memberdayakan rumah tangga pertanian pedesaan, baik secara individu maupun kelompok, dengan keterampilan, membangun kepercayaan diri dan menggunakan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian dan meningkatkan standar hidup secara berkelanjutan.

Capaian Kegiatan Tahun 2025 di Pusat antara lain:

- 1) jasa konsultan mobilisasi kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan aktivitas pertanian dan mata pencaharian di tingkat pusat;





- 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3) Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan READSI;
- 4) *Workshop Knowledge and Success Story Program READSI*;
- 5) Publikasi dan Diseminasi capaian Program READSI;
- 6) Pertemuan Nasional Hasil *Project Completion Report*; dan
- 7) Pertemuan *Exit Strategy*.



Gambar 9. Knowledge Sharing Keberlanjutan Program READSI bagi Penyuluh dan Penyusunan Buku Cerita Sukses Program READSI, Hotel Swissbel Bogor, Tanggal 7 – 10 Januari 2025



Gambar 10. Rekonsiliasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2019 – 2024 Program READSI, Hotel Swissbel Bogor, 7 – 10 Januari 2025



Gambar 11. Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 2024 dan Tindak Lanjut LHP BPK 2023, Hotel Swissbel Bogor, Tanggal 7 – 10 Januari 2025





Gambar 12. Rekonsiliasi Rekening Khusus IFAD Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, Hotel Swissbel Bogor, Tanggal 9 – 11 Januari 2025



Gambar 13. Koordinasi Laporan Akhir Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Program READSI, Luminor Bogor, Tanggal 22 – 24 Januari 2025

b. Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

Perkembangan kegiatan penumbuhan dan penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sampai dengan akhir Tahun 2025 total berjumlah **1.705** Kelompok. Perkembangan kegiatan penumbuhan dan penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) menurut klasifikasinya Tahun 2025 pada tabel 25.

Tabel 22. P4S Menurut Klasifikasi Tahun 2025

No	Klasifikasi P4S	Jumlah	Persentase
1	Pertama	860	50,44%
2	Madya	677	39,71%
3	Utama	168	9,85%
Total		1.705	100%

Sumber Data: Pusat Pelatihan Pertanian, Tahun 2025 (**RAPIM B Januari-Karawang**)

Perkembangan kegiatan penumbuhan dan penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sampai dengan akhir Tahun 2025, tertinggi adalah pada klasifikasi pertama yaitu 50,44% dan terendah pada klasifikasi utama yaitu 9,85%.

1) Strategi Pengembangan & Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya (P4S) sebagai berikut :

- Mendorong P4S menjadi Tempat Uji Kompetensi/ sertifikasi





- b) Penguatan Prasarana dan Sarana Pelatihan Pertanian di P4S
- c) Peningkatan Kompetensi Pengelola P4, melalui pelatihan, pendampingan, pemagangan dan lainnya
- d) Pengembangan Kurikulum Pelatihan di P4S menyesuaikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai SKKNI.
- e) Pendampingan P4S untuk melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan jejaring usaha.
- f) Pendampingan P4S untuk menjadi Lembaga pelatihan otonom dalam mendidik, membina dan menciptakan tenaga kerja terampil dan berkualitas.

2) Kendala Dalam Pembinaan P4S sebagai berikut :

- a) Keterbatasan Anggaran dari APBN
- b) Kurangnya Pemahaman Pengelola P4S terkait tugas dan fungsi
- c) Keterbatasan Pengetahuan pengelola P4S dalam pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan yang terstandar SKKNI.
- d) Kurangnya pengetahuan pengelola P4S terkait akses dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pelatihan pertanian.
- e) Kendala akses ke tiap lokasi P4S yang tersebar di beberapa desa/dusun.
- f) Keterbatasan pendampingan oleh penyuluh yang perbandingannya masih belum ideal.



Gambar 14. Pengembangan P4S Mendukung Replikasi Program READSI, BBPMKP Ciawi, Tanggal 11 – 13 Maret 2025





Gambar 15. Koordinasi Penguatan Peran P4S Mewujudkan Swasembada Pangan, BBPMKP Ciawi – Jawa Barat, Tanggal 4 – 6 Juli 2025

c. Pelatihan Bidang Pertanian Tahun 2025

Pusat Pelatihan Pertanian melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Dari **76.158** peserta yang mengikuti pelatihan, sebanyak **71.493** peserta telah meningkat kompetensinya atau sebesar **93,87%**. Persentase SDM Pertanian yang meningkat kompetensinya dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 23. Persentase SDM Pertanian yang meningkat kompetensinya

No	UPT Pelatihan	Jumlah		Persentase
		Peserta yang mengikuti Pelatihan	Peserta yang meningkat kompetensinya	
1	BBPMKP Ciawi	2.480	2.471	99,64%
2	BBPKH Cinagara	1.965	1.891	96,23%
3	BBPP Lembang	14.269	13.679	95,87%
4	BBPP Ketindan	4.311	4.205	97,54%
5	BBPP Batu	8.333	7.591	91,10%
6	BBPP Batangkaluku	1.001	967	96,60%
7	BBPP Binuang	15.286	13.797	90,26%
8	BBPP Kupang	1.560	1.410	90,38%
9	Bapeltan Jambi	2.946	2.930	99,46%
10	Bapeltan Lampung	24.007	22.552	93,94%
Total		76.158	71.493	93,87%

Sumber Data: Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan 2025

Peningkatan kompetensi SDM pertanian diukur berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran dan pasca pelatihan yang mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, serta sikap dan perilaku. Penilaian dilakukan dengan pembobotan keterampilan sebesar 50%, pengetahuan sebesar 30%, dan sikap serta perilaku sebesar 20%. Pengukuran tersebut mengacu pada instrumen evaluasi pembelajaran dan evaluasi pasca pelatihan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan





Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 137/Kpts/SM.120/I/08/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pertanian.

1) Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Jumlah Brigade Pangan (BP)

Target Brigade Pangan (BP) dan Realisasi Brigade Pangan (BP) yang dilatih pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 24. Target Brigade Pangan (BP) dan Realisasi Brigade Pangan (BP)
Dilatih Tahun 2024 dan 2025

No.	UPT	Provinsi	Target BP			Realisasi BP Dilatih		
			2024	2025 (EMonev)	Total	2024	2025	Total
1	BAPELTAN JAMBI	Jambi	69	44	113	69	53	122
2	BAPELTAN LAMPUNG	Sumsel	326	409	735	326	288	614
3	BAPELTAN LAMPUNG	Lampung	140	96	236	140	99	239
4	BBPKH CINAGARA	Kep. Babel	48	-	48	48	-	48
5	BBPP BATU	Kalbar	204	117	321	204	-	204
6	BBPP LEMBANG	Kalteng	258	110	368	258	20	278
7	BBPP LEMBANG	Jawa Barat	-	99	99	-	38	38
8	BBPP BINUANG	Kalsel	208	173	381	208	109	317
9	BBPP KETINDAN	Papua Selatan	210	128	338	209	34	243
10	BBPP KETINDAN	Jawa Timur	-	88	88		95	95
11	BBPP BATANGKALUKU	Kaltara	-	51	51	-	50	50
12	BBPP BATANGKALUKU	Sulawesi Selatan	-	338	338		2	2
13	BBPP KUPANG	Kaltim	-	69	69	-	69	69
14	BBPMKP CIAWI	Bengkulu	-	60	60	-	13	13
TOTAL			1.463	1.782	3.245	1.462	870	2.332

Sumber Data: Pusat Pelatihan Pertanian, Tahun 2025 (RAPIM B Januari-Karawang)

2) Kegiatan TOT mendukung Brigade Pangan Bagi Penyuluh Pertanian

Capaian pelaksanaan kegiatan TOT mendukung Brigade Pangan Bagi Penyuluh Pertanian tahun 2025 adalah 100%. Rincian target dan





realisasi pelaksanaan kegiatan TOT mendukung Brigade Pangan Bagi Penyuluh Pertanian pada tabel 24.

Tabel 25. Pelaksanaan Kegiatan TOT Mendukung Brigade Pangan Bagi Penyuluh Pertanian Tahun 2025

No	UPT Pelatihan	Wilayah	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%
1	BBPMKP Ciawi	Jawa Barat	70	70	100%
2	BBPKH Cinagara	Kep. Bangka Belitung	30	30	100%
3	BBPP Lembang	Kalimantan Tengah	60	60	100%
4	BBPP Batu	Kalimantan Barat	30	30	100%
5	BBPP Ketindan	Papua Selatan	30	30	100%
6	BBPP Binuang	Kalimantan Selatan	30	30	100%
7	BBPP Batangkaluku	Kalimantan Utara	30	30	100%
8	BBPP Kupang	Kalimantan Timur	30	30	100%
9	Bapeltan Jambi	Jambi	30	30	100%
10	Bapeltan Lampung	Sumatera Selatan Lampung	30	30	100%
JUMLAH			370	370	100%

Sumber Data: Pusat Pelatihan Pertanian, 2025 (RAPIM B Januari-Karawang)



Gambar 16. Fasilitas dan Pendampingan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, TUK LSP Pertanian Kementerian Pertanian, Januari – Desember 2025





2. Capaian Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2025 Lainnya

Capaian Kegiatan lainnya pada Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2025 meliputi:

a. FGD Peran Strategis Pelatihan mewujudkan Swasembada Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memperkuat, dan menyelaraskan peran strategis pelatihan pertanian dan widyaiswara dalam mendukung program nasional Swasembada Pangan, sesuai arah kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dan program prioritas Kementerian Pertanian. Output dari kegiatan ini adalah Revitalisasi Pelatihan, Kurikulum dan Materi Pelatihan agar selaras dengan isu global dan tantangan ketahanan pangan nasional, Penguatan Kapasitas Widyaiswara dan Fasilitator Pelatihan melalui TOT berkelanjutan dan kolaboratif Integrasi Program Pelatihan dengan Ekosistem Kelembagaan Pertanian, khususnya BP, P4S, UPJA, sebagai wahana praktik pembelajaran dan pembuktian dampak, Monitoring dan Evaluasi Dampak Pelatihan harus dilakukan secara periodik dengan indikator kinerja yang terukur (*output*, *outcome*, dan *impact*), dan Pengembangan Platform Digital Terintegrasi untuk pelatihan dan diseminasi materi, serta dokumentasi praktik baik, yang dapat diakses secara luas oleh siapa saja kapan saja.

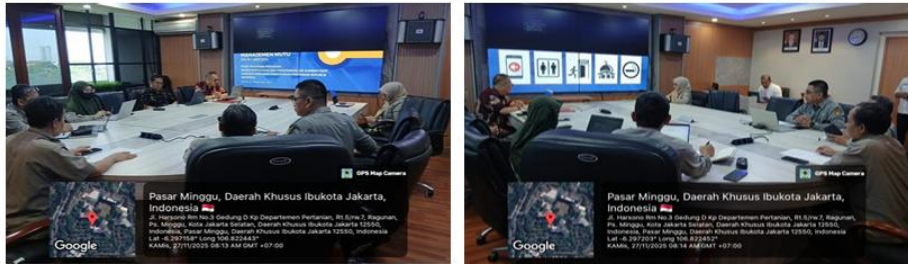


Gambar 17. Koordinasi Penguatan Peran P4S Mewujudkan Swasembada Pangan, BBPKMKP Ciawi – Jawa Barat, Tanggal 2 – 4 Juli 2025

b. Audiensi Surveilans ISO 9001:2015 Pusat Pelatihan Pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk Melaksanakan audiensi dalam rangka Surveillance Audit ISO untuk memastikan kesesuaian penerapan standar ISO 9001:2015 oleh PT Enhall Mandiri 186 di lingkungan Puslatan. Output dari kegiatan ini adalah Standar Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 telah diverifikasi di lokasi Pusat Pelatihan Pertanian dengan cara sampling acak oleh tim audit yang dipilih dengan tepat serta tersusunnya Laporan Akhir Penerapan, Peningkatan dan Pendampingan Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Pusat Pelatihan Pertanian.





Gambar 18. Audiensi Survailen ISO 9001:2015 Pusat Pelatihan Pertanian, Ruang Rapat AOR Pusat Pelatihan Pertanian, tanggal 27 November 2025

c. Monitoring Magang Usaha Tani Penerima DAK 2025 di P4S

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring/penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan magang usaha tani P4S. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya data pelaksanaan magang usaha tani P4S penerima DAK TA 2025 dan teridentifikasinya permasalahan dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan magang.



Gambar 19. Monitoring Magang Usaha Tani Penerima DAK 2025 di P4S, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, September 2025

d. Koordinasi Kegiatan dan Anggaran Pelatihan Brigade Pangan Tahun 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akselerasi pelaksanaan Pelatihan Brigade Pangan Tahun 2025 melalui sinkronisasi strategi, penguatan koordinasi lintas unit, serta penajaman materi dan sasaran pelatihan guna mendukung pencapaian swasembada pangan secara akuntabel. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya kesepakatan bersama terkait strategi percepatan pelaksanaan pelatihan





Brigade Pangan Tahun 2025, teridentifikasinya capaian realisasi pelatihan dan serapan anggaran sampai dengan periode pelaporan, tersusunnya arahan teknis pelaksanaan pelatihan bagi Brigade Pangan tahun pembentukan 2024 dan 2025, skema koordinasi lintas UPT dalam dukungan pembiayaan pelatihan pada wilayah tertentu tanpa perubahan output dan pagu DIPA, ditetapkan fokus materi pelatihan prioritas (alsintan, pencatatan usaha tani, dan budidaya) sesuai kebutuhan lapangan, tersusunnya langkah monitoring dan pencatatan peserta pelatihan untuk menjamin ketepatan sasaran dan menghindari duplikasi peserta, serta tersedianya rencana tindak lanjut pelaksanaan pelatihan pada wilayah yang capaian realisasinya masih rendah atau belum ditetapkan pelaksanaannya.



Gambar 20. Koordinasi Kegiatan dan Anggaran Pelatihan Brigade Pangan Tahun 2025, BBPMKP Ciawi, Tanggal 2 – 3 Juli 2025

e. Pendampingan dan Pelepasan Peserta Magang Taiwan 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM pertanian generasi muda Indonesia melalui program magang internasional guna mencetak petani milenial yang kompeten. Ouput dari kegiatan ini adalah Sebanyak 35 orang peserta dinyatakan lolos dan siap diberangkatkan ke Taiwan dengan bekal kemampuan bahasa, pemahaman kondisi sosial-budaya, serta kesiapan fisik dan mental.



Gambar 21. Pendampingan dan Pelepasan Peserta Magang Taiwan 2025, BBPMKP Ciawi, 8 – 9 Juni 2025.





f. Koordinasi dan Audiensi Program Magang Luar Negeri

Kegiatan ini bertujuan untuk Mengidentifikasi potensi dan dukungan daerah terhadap program pengiriman petani muda magang ke Jepang dan Taiwan serta melakukan promosi dan penjangkakan kerja sama dalam pelaksanaan program magang petani muda luar negeri. Output dari kegiatan ini adalah terjalinnnya kesepahaman terkait keberlanjutan program pengiriman petani muda ke Jepang dan Taiwan dan terbukanya peluang pengalokasian pendanaan daerah (APBD) untuk program magang luar negeri, meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran tahun mendatang.



Gambar 22. Koordinasi dan Audiensi Program Magang Luar Negeri, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Tanggal 7 – 8 Oktober 2025

g. Koordinasi Penjaminan Mutu Pelatihan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan agar lebih efektif dan efisien. Output dari kegiatan ini adalah ditetapkannya pembagian kewenangan akreditasi secara tegas, di mana akreditasi lembaga dilakukan oleh LAN, sementara akreditasi program pelatihan menjadi kewenangan Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan); ditetapkannya rencana penguatan tim penjaminan mutu internal di setiap unit kerja melalui integrasi peran *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC); tersedianya Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) sebagai dokumen pedoman nasional dan rujukan utama dalam proses akreditasi, sertifikasi, serta sistem penjaminan mutu lembaga pelatihan; dan teridentifikasinya kebutuhan penguatan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam akselerasi akreditasi lembaga, akreditasi program, serta pemenuhan standar manajemen mutu ISO 9001:2015.





Gambar 23. Koordinasi Penjaminan Mutu Pelatihan, Museum Tanah dan Pertanian, Tanggal 25 – 27 Juni 2025

h. Akreditasi Program Pelatihan

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat pemenuhan standar akreditasi program pelatihan, menjamin mutu penyelenggaraan program pelatihan, memberikan dasar penetapan status akreditasi program pelatihan, dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Output dari kegiatan ini adalah nilai dan status akreditasi program pelatihan pada BBPP Batu, Bapeltan Jambi, Bapeltan Lampung, UPT Pelatihan Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, serta rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu program pelatihan dan Laporan Akreditasi Program Pelatihan.



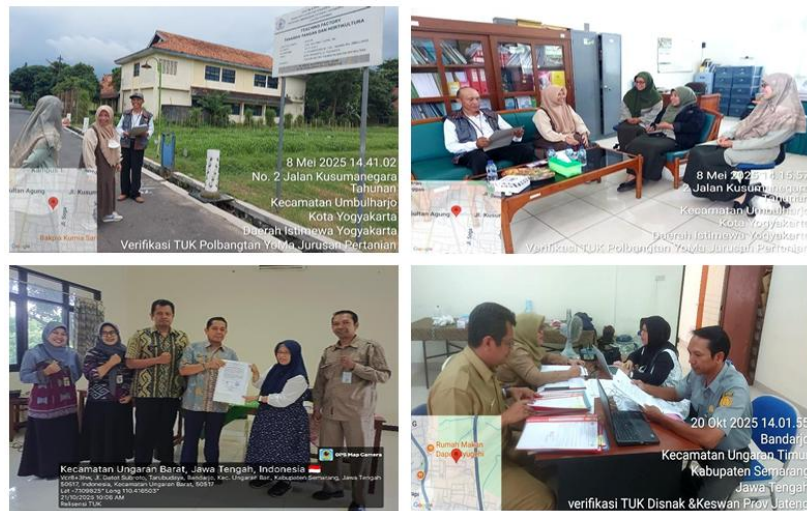
Gambar 24. Akreditasi Program Pelatihan, UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah, November – Desember 2025.





i. Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi (Survailen)

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan masih terpeliharanya sertifikat kompetensi kerja bagi pemegang sertifikat. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan survailen bagi pemegang sertifikat kompetensi bidang Inseminasi Buatan, Ternak Ruminansia Besar, Penjualan Hewan Halal, Paramedik dan Penyuluh Pertanian yang hampir habis masa berlakunya.

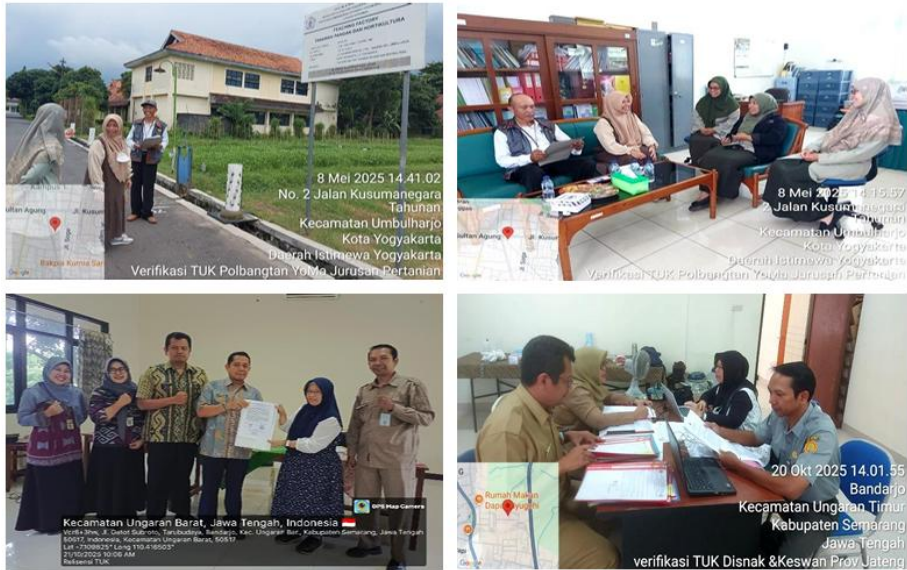


Gambar 25. Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi (Survailen), TUK BBIB Singosari, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batu, Fakultas Pertanian Mjokerto, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah, DWP Perhptani Lumbang, BIB Lembang, DPW Perhptani Jawa Timur, FP Universitas Majalengka dan SMKPP Negeri Saree Aceh, BBPP Kupang, BBPP Binuang, BBPP Lembang, Polbangtan Malang, Januari – Desember 2025

j. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa TUK memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan manajemen yang ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP 206 – 207. Output dari kegiatan ini Daftar Periksa Verifikasi Persyaratan Umum Administrasi dan Teknis TUK dan Keputusan Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian (LSP) tentang Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Sertifikat TUK Terverifikasi.





Gambar 26. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Kantor Sekretariat TUK Mandiri LSP Pertanian, Mei – Desember 2025

k. **Penyusunan Skema Sertifikasi Sektor Pertanian**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menyempurnakan perangkat sertifikasi kompetensi SDM Pertanian berupa skema sertifikasi. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya 11 skema sertifikasi kompetensi bidang alat dan mesin pertanian.

l. **Resertifikasi Asesor Kompetensi/ *Recognition Current Competency* (RCC)**

Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan SDM Asesor Kompetensi serta untuk menjamin terlaksananya penilaian yang kompeten dan kredibel. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) Tahun 2019 dari BNSP. Output dari kegiatan ini adalah Berita Acara Hasil asesmen Asesor Kompetensi dan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Asesor Kompetensi.

m. **Pertemuan Forum Komunikasi Asesor Kompetensi (FK ASKOMTAN) Tahun 2025**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Asesor Kompetensi di berbagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur pelaksanaan asesmen kompetensi sesuai dengan pedoman LSP Pertanian dan BNSP, meningkatkan profesionalisme dan integritas Asesor Kompetensi melalui pembinaan dan diskusi teknis, mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan uji kompetensi di





lapangan, dan merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi pertanian. Output dari kegiatan ini adalah Penyempurnaan Pedoman-Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang ada saat ini, Hasil identifikasi dan pemetaan tenaga Asesor dan Asesi Bidang Pertanian untuk mengetahui keberlakuan dan kemanfaatan sertifikat kompetensi (Surveilen), serta Pendataan Asesor Kompetensi bidang pertanian yang masih aktif namun selama 3 tahun terakhir belum mencapai 6 kali menguji, dan disepakati bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi satu atap oleh LSP-P2. Selain itu Implementasi Kode Etik Asesor Kompetensi dalam pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi harus sesuai dengan SOP Pelaksanaan Asesmen pada LSP-P2 Pertanian Kementan.



Gambar 27. Pertemuan Forum Komunikasi Asesor Kompetensi (FK ASKOMTAN) Tahun 2025, Bapeltan Soropadan – Jawa Tengah, 8 – 9 November 2025

n. **Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Kegiatan Swasembada Pangan**

Selain melaksanakan tugas dan fungsi utama, Pusat Pelatihan Pertanian juga melaksanakan penugasan Menteri Pertanian yang menjadi tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kegiatan Swasembada Pangan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Penugasan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan. Dalam perkembangannya, pada bulan September 2025 ditetapkan revisi kedua yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/KP.250/A/09/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian target dan penetapan penanggung jawab kegiatan, termasuk Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, yang mulai berlaku pada tanggal 9 September 2025.





Adapun rincian kegiatan Swasembada Pangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Lahan Tahun 2024;
- 2) Cetak Sawah Rakyat (CSR) 2025;
- 3) Optimasi Lahan 2025;
- 4) Brigade Pangan yang terbentuk di 2025; dan
- 5) Luas Tambah Tanam Reguler.

Pusat Pelatihan Pertanian ditugaskan sebagai penanggung jawab kegiatan Swasembada Pangan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pelaksanaan penugasan tersebut, kegiatan utama yang menjadi fokus Satgas Kerawanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Optimalisasi Lahan/Cetak Sawah Rakyat Tahun 2025, Target Brigade Pangan Tahun 2025, serta Target Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler.

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase
1	Optimalisasi Lahan Tahun 2024	28.925	43.853	151,61%
2	Optimalisasi Lahan Tahun 2025	3.000	4.343	144,77%
3	Cetak Sawah Rakyat Tahun 2025	50.350	589	1,17%
4	Luas Tambah Tanam Reguler Tahun 2025	72.083	35.305	48,89%
5	Brigade Pangan Tahun 2025	15	30	200%

Sumber Data: Pusat Pelatihan Pertanian, Tahun 2025

Dari tabel diatas capaian Cetak Sawah Rakyat Tahun 2025 sebesar 1,17%, yang disebabkan oleh berbagai kendala teknis dan non teknis terutama pada kesiapan lahan CSR. Hingga saat ini belum tersedia lahan CSR dengan luasan minimal sekitar 200 hektar dalam satu hamparan yang ideal untuk budidaya padi secara menguntungkan. Selain itu, tingkat keasaman tanah yang masih tinggi meskipun telah diberikan perlakuan dolomit, kondisi lahan yang bergelombang dan masih banyak tunggul, serta struktur dan tekstur tanah yang belum stabil menyebabkan proses pengolahan lahan, pemupukan, dan pengairan belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga tahapan pelaksanaan program memerlukan waktu penyiapan yang lebih panjang. Dalam pelaksanaan penugasan Swasembada Pangan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Pusat Pelatihan Pertanian melakukan berbagai langkah operasional dan pendampingan untuk memastikan percepatan capaian target kegiatan





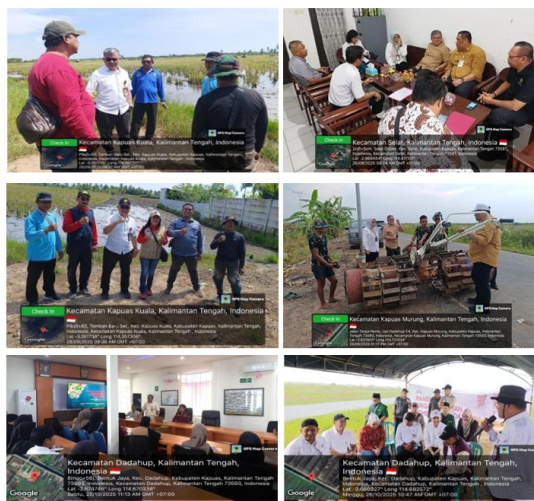
meliputi Penguatan komitmen melalui fasilitasi kejelasan perjanjian kerja sama serta penetapan jadwal tanam yang terukur; Pendampingan peningkatan kemandirian kelembagaan Brigade Pangan; Koordinasi penyelesaian permasalahan lapangan, khususnya terkait kesiapan dan kesesuaian lahan, kondisi fisik tanah, serta kebutuhan dukungan prasarana; Monitoring dan evaluasi berkala.



Gambar 28. Pendampingan dan Monitoring Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 17 – 18 Maret 2025



Gambar 29. Penguatan Program Mendukung Swasembada Pangan Provinsi Kalimantan Utara, 19 – 22 Mei 2025



Gambar 30. Penguatan Program Mendukung Swasembada Pangan Provinsi





Kalimantan Tengah, September – November 2025

D. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2025

1. Capaian Kegiatan Utama Pusat Penyuluhan Pertanian

Kegiatan utama pada Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Koordinasi Luas Tambah Tanam, Penyerapan Gabah dan Sosialisasi Inpres No. 3 Tahun 2025 Pendayagunaan Penyuluh Pertanian.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan pengalihan penyuluh pertanian ke pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Tahun 2025, sekaligus membantu penyuluh, petani, dan pemerintah memahami implikasi perubahan tersebut. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran penyuluh sebagai garda terdepan dalam mendorong penerapan inovasi dan teknologi pertanian modern, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan akademisi guna mendukung percepatan swasembada pangan, serta meningkatkan koordinasi antarpenyuluh, dinas pertanian, balai penyuluhan, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Output dari kegiatan ini adalah terwujudnya kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2025, meningkatnya pemahaman penyuluh, petani, dan pemerintah daerah mengenai mekanisme pengalihan dan peran strategis penyuluh pertanian, tersusunnya langkah koordinasi dan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan luas tambah tanam dan penyerapan gabah, serta meningkatnya sinergi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mendukung percepatan swasembada pangan.



Gambar 31. Koordinasi Luas Tambah Tanam, Penyerapan Gabah dan Sosialisasi Inpres No. 3 Tahun 2025 Pendayagunaan Penyuluh Pertanian di Gor Tridarma Petrokimia Gresik Provinsi Jawa Timur, Tanggal 14 s.d 15 Maret 2025





b. MSPP Edisi Spesial dengan tema “Kementan Tegaskan Brigade Pangan Garda Terdepan Menuju Swasembada Pangan Nasional”.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional untuk swasembada pangan, mengurangi ketergantungan pada impor pangan serta meningkatkan pendapatan petani melalui pengelolaan lahan yang lebih efisien dan produktif. *Output* dari kegiatan ini adalah penguatan kapasitas penyuluh pertanian; kolaborasi antar *stakeholder*; dan pemberdayaan petani melalui Brigade Pangan. Dari kegiatan ini juga dirumuskan rencana tindak lanjut antara lain Implementasi pelatihan lanjutan untuk penyuluh di daerah; pengembangan program pendampingan terpadu di lapangan; fasilitasi akses kredit mikro dan dukungan finansial dari perbankan untuk petani anggota Brigade Pangan; dan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian produksi pangan di wilayah sasaran.



Gambar 32. MSPP Edisi Spesial dengan tema “Kementan Tegaskan Brigade Pangan Garda Terdepan Menuju Swasembada Pangan Nasional” di BBPMKP Ciawi-Bogor, Tanggal 12 Juni 2025

c. Kegiatan Kopdes Merah Putih yang diusulkan *Mock up* di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa, memungkinkan pemangkasan jalur perizinan serta dukungan dari kementerian dan lembaga secara terkoordinasi, dan mendapatkan sokongan dari APBN, BUMN, swasta, hingga kemitraan internasional bila diperlukan. *Output* dari kegiatan ini adalah terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih Secara Legal dan Kelembagaan, terselenggaranya Kegiatan Peluncuran secara Partisipatif, teridentifikasinya Potensi Ekonomi Desa untuk Usaha Koperasi: meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat desa, terselenggaranya pelatihan dan pembekalan awal, komitmen lintas sektor untuk Mendukung KDMP, serta dokumentasi dan publikasi kegiatan peluncuran.





Gambar 33. Kegiatan Kopdes Merah Putih yang diusulkan Mock up di Desa





Sidamulya, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 25 – 27 Juni 2025

d. Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, Penyaluran BOP, dan Realisasi Dana Dekonsentrasi

Kegiatan ini bertujuan untuk Mensosialisasikan isi dan arah kebijakan Inpres No. 3 Tahun 2025 kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua, Mendorong percepatan pelaksanaan dan pelaporan program Biaya Operasional Penyuluh (BOP), Mengkonsolidasikan data dan progres realisasi dana Dekonsentrasi tahun 2025 pada Satker penyuluhan pertanian, dan Memperkuat partisipasi penyuluh dalam pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) dan luas panen, sebagai bagian dari upaya mencapai target swasembada pangan. *Output* dari kegiatan ini antara lain Peserta memahami dengan baik substansi dan mandat yang diatur dalam Inpres No. 3 Tahun 2025, Terjadi konsolidasi data awal penyaluran BOP dan realisasi dana dekonsentrasi di berbagai kabupaten/kota, Terbentuknya komitmen bersama untuk mengoptimalkan peran penyuluh dalam mendukung swasembada pangan dan pelaporan berbasis sistem elektronik (e-Pusluh), dan Tertampungnya berbagai masukan terkait kendala teknis dan kebutuhan lapangan dari peserta untuk disampaikan ke pusat.





Gambar 34. Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, Penyaluran BOP, dan Realisasi Dana Dekonsentrasi di BRMP Papua, Tanggal 24 Juli 2025

e. *Focus Group Discussion* (FGD) Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pasca Terbitnya Inpres No 3 Tahun 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian Pasca Terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2025; dan menyamakan persepsi dan pemahaman terkait pasca terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2025. Saat ini sedang proses penyusunan Perpres Urusan Tambahan Konkuren Bidang Pertanian, penetapan Penyuluh Pertanian ASN akan menjadi jabatan fungsional tertutup dan hanya berada di bawah Kementerian Pertanian. Hal ini menjadi dasar pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat secara resmi. Kebijakan penarikan penyuluh pertanian ke pusat ini merupakan sebuah terobosan manajemen yang cukup besar. Tentu kebijakan ini memiliki berbagai implikasi yang membutuhkan penanganan. Pada FGD ini terdapat 10 narasumber yang menyampaikan pemaparan masing-masing. Kesimpulan diskusi ini adalah Kementerian Pertanian berperan strategis dalam mengimplementasikan Inpres Nomor 3 Tahun 2025 dengan menarik penyuluh pertanian ke pusat sebagai jabatan fungsional tertutup, memperkuat sistem penyuluhan nasional berbasis digital dan kinerja, serta mengarahkan penyuluh untuk mendukung program prioritas pangan. Selain itu, Kementan menjaga sinergi dengan pemerintah daerah melalui optimalisasi peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat layanan dan koordinasi di lapangan.







Gambar 35. Focus Group Discussion (FGD) Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pasca Terbitnya Inpres No 3 Tahun 2025 di Ruang Majelis Fakultas Pertanian, Kantor Dekanat Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Tanggal 7 – 8 Agustus 2025.

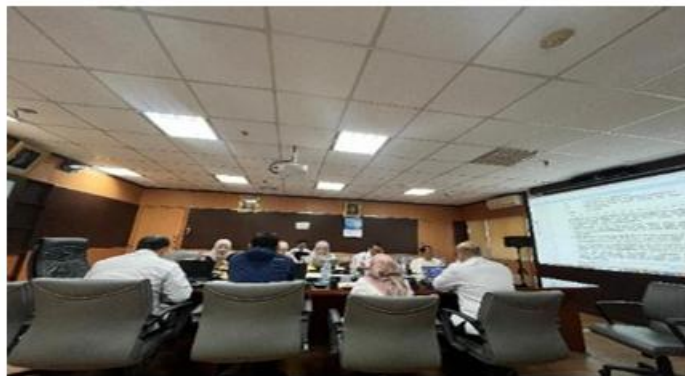
f. Koordinasi Tindak Lanjut Nota Dinas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani Nelayan Tahun 2026

Kegiatan ini bertujuan untuk Menyelaraskan dukungan penyelenggaraan PENAS XVII di Provinsi Gorontalo dan Melakukan komunikasi, koordinasi, serta pengajuan anggaran ke daerah maupun lintas kementerian. *Output* dari kegiatan ini adalah menyelaraskan disposisi disposisi Menteri Pertanian yang diteruskan kepada Sekretaris Jenderal, kemudian kepada Biro Hukum dan Biro Umum, terkait permintaan arahan formal mengenai dukungan penyelenggaraan PENAS XVII di Provinsi Gorontalo. Dukungan formal dari Menteri dianggap penting sebagai dasar resmi bagi BPPSDMP dan Kटना (Kontak Tani Nelayan Andalan) untuk melakukan komunikasi, koordinasi, serta pengajuan anggaran ke daerah maupun lintas kementerian, sebagai berikut Memerlukan anggaran yang besar terkait jumlah yang diharapkan mencapai 30.000 orang dan tahun 2026 seluruh Penyuluh Pertanian berada di Pusat sehingga unit kerja Eselon I dapat menganggarkan anggaran yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian, Penyampaian surat dukungan formal dari Menteri Pertanian yang akan menjadi rujukan bagi BPPSDMP





dan KTNA untuk menginformasikan secara resmi ke pemerintah daerah serta mengajukan alokasi anggaran di tahun 2026; Koordinasi teknis lintas unit kerja di Kementerian Pertanian agar persiapan penyelenggaraan PENAS di Gorontalo berjalan lancar, termasuk penyusunan rancangan kegiatan, kebutuhan anggaran, dan dukungan sarana prasarana; Konsolidasi dengan KTNA dan pemerintah daerah Gorontalo untuk memastikan kesiapan lokasi, fasilitas, dan partisipasi peserta dari seluruh Indonesia; dan rapat ini menjadi salah satu landasan penyelenggaraan PENAS XVII Tahun 2026 di Gorontalo, sekaligus mengokohkan peran Kementerian Pertanian sebagai pembina utama petani dan nelayan Indonesia.



Gambar 36. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Nota Dinas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani Nelayan Tahun 2026 di Ruang Rapat Biro Hukum, Gd. A Lt. 5, Tanggal 3 September 2025

g. Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Upaya Pemerintah untuk Pemantapan Ketahanan Pangan Komoditas Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat A Gedung D Lt. 4 yang bertujuan untuk Membahas Satu Data Pertanian (Penyediaan data produksi tanaman pangan dan data untuk sistem informasi pangan khususnya komoditas padi, jagung, dan kedelai), serta akses ke aplikasi Simluhtan dan Brigade Pangan. *Output* dari kegiatan ini adalah Pemaparan bahan presentasi oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian terkait Satu Data Pertanian yang berisi Dasar Hukum Permentan Nomor 40 Tahun 2021 yaitu Tugas Walidata dan Produsen Data Kementan, Produsen Data Lingkup Kementan, Pengelolaan Data Pusdatin di Kementan (Data Komoditas Dan Data Non Komoditas), Penyajian Data Melalui *Website* Kementan (pertanian.go.id), Penyajian Data Melalui Portal Satu Data Pertanian (satudata.pertanian.go.id),





Penyajian Statistic Melalui Portal Satu Data Pertanian (satudata.pertanian.go.id/statistik) serta Database Pusdatin Kementan (bdsp2.pertanian.go.id). Salah satu pembahasan terkait akses aplikasi Simluhtan dan Brigade Pangan.

h. Pendampingan Kunjungan Kementerian Pertanian dan Ketahanan Makanan, Malaysia

Kegiatan ini bertujuan untuk Mendampingi kunjungan lapang KPKM Malaysia ke beberapa lokasi visit di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dalam rangka pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai TSS, khususnya dalam pembudidayaan. Kunjungan dilaksanakan ke beberapa Lokasi diantaranya Polbangtan Yoma, Rumah Bawang Wonosobo, Kelompok Tani Ngudi Makmur II, Gunung Kidul, dan Joglo Tani, Sleman. Secara keseluruhan, kunjungan delegasi Departemen Pertanian Malaysia berjalan lancar dan memberikan hasil positif. Selain memperluas wawasan peserta mengenai pengembangan benih bawang merah dan sistem pertanian terpadu, kegiatan ini juga membuka peluang kerja sama nyata di bidang pengembangan SDM pertanian. Kebutuhan tenaga kerja sebanyak 250 lulusan Polbangtan menjadi poin penting hasil kunjungan ini, dan BPPSDMP akan menindaklanjutinya melalui pemetaan lulusan serta mekanisme penyaluran tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mitra Malaysia. KPKM Malaysia terbuka untuk merangkai kunjungan dari para penyuluh pertanian Indonesia untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan mengenai komoditas tertentu di Malaysia. Hal ini dapat menjadi tonggak kerjasama penyuluhan pertanian kedua negara.





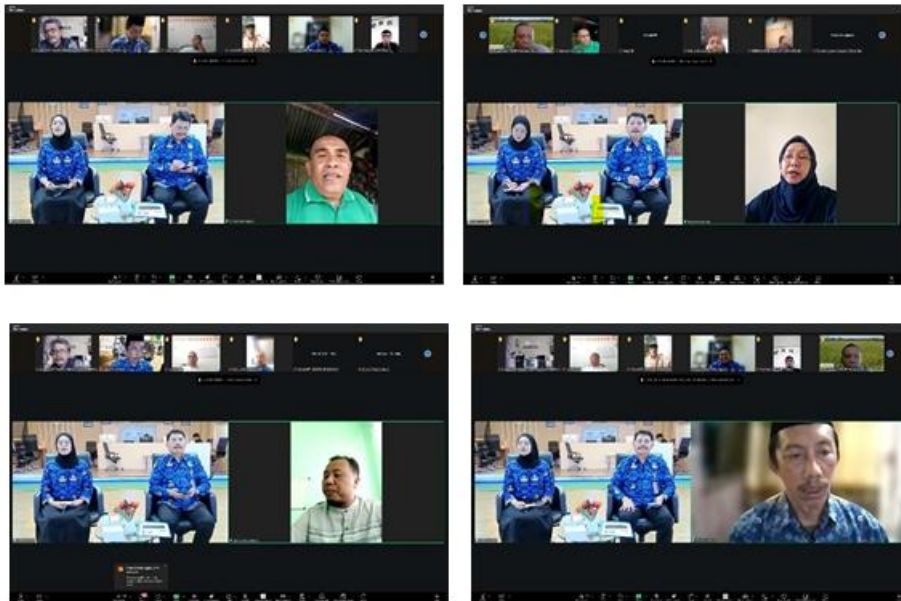


Gambar 37. Pendampingan Kunjungan Kementerian Pertanian dan Ketahanan Makanan, Malaysia di Wilayah Yogyakarta dan Sekitarnya, Tanggal 6 – 9 Oktober 2025

i. **MSPP Vo. 33 dengan Tema ”Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) Urusan Pemerintah Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian”**

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar seluruh penyuluh memahami pembagian kewenangan dan fungsi sesuai urusan konkuren tambahan; dan mengawal Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2025 dan R-Perpres Urusan Konkuren Bidang Pertanian. *Output* dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2025 telah berjalan baik sebagai tindak lanjut percepatan swasembada pangan. Kementerian Pertanian bersama lintas kementerian memperkuat sinergi kebijakan, program, dan pendampingan dengan capaian positif di berbagai daerah. Kebijakan pertanian difokuskan pada penguatan regulasi, modernisasi, dan peningkatan produksi padi dengan target produksi beras 33,8 juta ton, harga gabah Rp6.500/kg, cadangan beras 4,2 juta ton menuju zero impor, serta kenaikan NTP 4,9%. Upaya pendukung meliputi optimasi lahan 500 ribu ha, cetak sawah 225 ribu ha, serta penyediaan alsintan, pupuk subsidi, dan benih unggul. Modalitas pendukung mencakup lahan 7,38 juta ha, peningkatan anggaran dari Rp15,62 triliun (2024) menjadi Rp29,37 triliun (2025), serta bertambahnya petani milenial dan brigade pangan. Namun, masih terdapat tantangan berupa dampak El Nino, keterbatasan pupuk ($\pm 50\%$ kebutuhan), alsintan tua/rusak, 60% irigasi perlu rehabilitasi, kekurangan PPL, serta impor beras yang masih tinggi. Proses pengalihan penyuluh ASN dilakukan bertahap melalui tiga batch sejak Agustus hingga Oktober 2025. Pembagian urusan konkuren menegaskan peran Pusat pada kebijakan dan pengelolaan ASN, Provinsi pada koordinasi dan monev, serta kabupaten/kota pada pelaksanaan penyuluhan dan penguatan kapasitas petani di wilayahnya.





Gambar 38. MSPP Vo. 33 dengan Tema ” Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) Urusan Pemerintah Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian” di Ruang AWR Pusluh, Tanggal 17 Oktober 2025

j. Sosialisasi dan Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) di Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan; meningkatkan pemahaman pemanfaatan inovasi dan teknologi terapan; dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional. *Output* dari kegiatan ini adalah Kementerian Pertanian terus mendorong integrasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, dan pelaporan, dengan capaian Reformasi Birokrasi dan integritas yang meningkat, serta target nilai SAKIP yang lebih tinggi pada tahun 2025. Arah kebijakan transformasi birokrasi difokuskan pada penguatan SDM, penataan organisasi yang adaptif, serta tata kelola modern berbasis digital yang berorientasi pada hasil. Melalui integrasi SPIP, manajemen risiko, dan SAKIP, seluruh siklus kinerja diharapkan berjalan efektif, terukur, dan akuntabel. Kegiatan ini menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat sinergi antarunit kerja, melengkapi eviden kinerja, serta memastikan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi guna mencapai target kinerja secara transparan dan berkelanjutan.





Gambar 39. Sosialisasi dan Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) di Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025

2. Capaian Kegiatan Utama Pusat Penyuluhan Pertanian

Kegiatan lainnya pada Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perkembangan Database Kelembagaan Petani

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani, Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Sampai dengan bulan Desember 2025 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah 14.732 KEP. Rincian KEP tahun 2025 pada tabel 22.

Tabel 26. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tahun 2025

JUMLAH PROVINSI	JUMLAH KAB./KOTA	JUMLAH KEP
38	514	14.732

Sumber data. Pusat Penyuluhan Pertanian, Tahun 2025





Rincian KEP per provinsi tahun 2025 pada *lampiran 1*.

2) Kelas Kemampuan Kelompok tani

Data perkembangan kelas kemampuan kelompok tani bulan Desember sebagai berikut: pada 38 provinsi jumlah Pemula **478,725**; Lanjut **178,746**; Madya **28,720**; Utama **2,829**; dan belum diketahui **86,441**. Data kelas kemampuan kelompok tani sampai dengan 2025 seperti tabel dibawah ini.

Tabel 27. Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok

JUMLAH PROVINSI	JUMLAH KAB./KOTA	JUMLAH KELOMPOK TANI BERDASARKAN KELAS KELOMPOK					
		PEMULA	LANJUT	MADYA	UTAMA	BELUM DITENTUKAN	JUMLAH
38	514	478.725	178.746	28.720	2.829	86.441	775.461

Sumber Data: Pusat Penyuluhan Pertanian, Tahun 2025

Rincian Kelas Kemampuan Kelompok tani per provinsi tahun 2025 pada *lampiran 2*.

3) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025

Rekapitulasi jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian Tahun 2025 sampai dengan semester II tahun 2025 pada dibawah ini.

Tabel 28. Rekapitulasi Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025

Jumlah Anggota Kelompok Tani	Gabungan Kelompok Tani	Kelembagaan Ekonomi Petani
24.446.778	64.887	14.732

Sumber Data: Pusat Penyuluhan Pertanian, Tahun 2025

Rincian jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian per provinsi Tahun 2025, sampai dengan semester II tahun 2025 pada *lampiran 3*.

E. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN TAHUN 2025

1. Capaian Kegiatan Utama Pusat Pendidikan Pertanian

Kegiatan utama pada Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2025 sebagai berikut:





a. Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS)

Program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS) bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian bagi pemuda di pedesaan. Program ini menjadi langkah strategis dalam mendukung regenerasi petani dan wirausaha muda di bidang pertanian, dengan sasaran utama meningkatkan kapasitas pemuda agar memiliki kompetensi dan daya saing. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan program YESS dilakukan koordinasi pengelolaan proyek di tingkat pusat yang dilakukan oleh *National Project Management Unit* (NPMU). NPMU berfungsi untuk memastikan bahwa program YESS berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi para penerima manfaat, khususnya di kalangan pemuda yang membutuhkan peluang kerja dan dukungan sosial.

Pada tahun 2025 ini berdasarkan hasil *Annual Outcome Survey* (AOS) 2024 outreach program memiliki capaian sebesar **143,82%** atau sebesar **316.369** dari target **220.000** orang yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 165.024 orang atau sebesar 149,11% dari target 110.000 orang dan jumlah Perempuan sebanyak 152.377 orang atau sebesar 138,52% dari target 110.000. Tingginya laju pertumbuhan capaian *outreach* disebabkan akselerasi intervensi pelatihan Literasi Keuangan Dasar melalui *Community Base*, *Outreach* adalah jumlah pemuda pedesaan yang terdiri dari penerima manfaat program, alumni Lembaga TVET mitra program YESS serta jumlah *spillover* tenaga kerja yang direkrut oleh penerima manfaat program yang berwirausaha. Jika didetailkan dimana jumlah penerima manfaat program sebanyak 198.556 orang yang telah mendapatkan intervensi berupa pelatihan, permagangan, dan/atau hibah kompetitif, jumlah alumni TVET sebanyak 14.727 orang dan 103.086 orang *spillover* tenaga kerja.



Gambar 40. Pengukuhan lembaga TVET mitra program YESS





Capaian outcome komponen 2 yaitu jumlah wirausaha pedesaan yang didukung yang melaporkan peningkatan laba adalah sebanyak 46.226 orang, jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh pemuda melalui wirausaha dan UMK baru yang mendapatkan manfaat dari program sebanyak 103.086 orang dan sebanyak 29.216 orang jumlah penerima manfaat yang menjadi peserta Pelatihan di BDSP yang bekerja di sektor pertanian.

Capaian outcome komponen 3 yaitu Jumlah wirausaha pertanian pedesaan yang menggunakan layanan keuangan - produk tabungan sebanyak 81.668 orang dan jumlah penerima manfaat program yang sudah mengakses permodalan adalah sebanyak 20.872 orang. Akses Permodalan melalui Bank seperti KUR dan non-Bank seperti Hibah Kompetitif sebanyak 3.935 orang, Baznas, CSR, Pembiayaan Teknologi Fintage, dan pembiayaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).



Gambar 41. Kegiatan Kerjasama dan Koordiansi dengan Lembaga Keuangan

Capaian outcome komponen 4 telah menghasilkan 2 Undang-undang, peraturan, kebijakan atau strategi yang ada/baru yang diusulkan kepada pembuat kebijakan untuk disetujui, diratifikasi atau diubah. Komponen 4 pada sampai dengan tahun 2025 sudah berhasil memilih 143 *Young Ambassador of Agriculture (YAA)* yang terdiri dari 48 orang Perempuan dan 95 orang Laki-laki. Pada tahun 2023 sudah terbentuk Yayasan untuk organisasi untuk bisa menjadi motor penggerak minat generasi muda pertanian dalam berusaha di bidang pertanian serta sudah menciptakan 8 (delapan) studi literasi pemetaan program yang kemudian dapat diadopsi oleh program lain yang sejenis. Berdasarkan target yang ditetapkan, capaian diatas seluruh aktivitas logical framework program YESS telah berhasil melewati target. Peningkatan kapasitas melalui komunitas calon





Penerima Manfaat telah menunjukkan hasil positif, dengan 118.606 orang mengikuti pelatihan berbasis komunitas. Program pelatihan literasi keuangan dasar yang disampaikan dalam bentuk komunitas juga telah difasilitasi dengan pemberian makanan ringan dan minuman untuk peserta. Begitu pula dengan LMS, yang telah disempurnakan modul dan sistemnya untuk memudahkan akses bagi calon penerima manfaat.

b. Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PWMP)

Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang maju, mandiri, berdaya saing dan berjiwa kewirausahaan. Menindaklanjuti hal tersebut, BPPSDMP telah mencanangkan program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP), yang menjadi program andalan Kementerian Pertanian (Kemtan) dalam rangka regenerasi petani. Ke depan, generasi muda pertanian bukanlah pekerja bidang pertanian, tetapi menjadi pelaku usaha pertanian. Kementerian Pertanian menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan minat pemuda dan sarjana mendukung pembangunan sektor pertanian, diantaranya mengubah stigma tentang pertanian bukan hanya budi daya tanaman padi di sawah melainkan pengembangan sektor agribisnis dari subsistem hulu sampai hilir yang membuka peluang kerja dan peluang usaha dan strategi menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di bidang pertanian agar para lulusan perguruan tinggi dari fakultas pertanian lebih menjadi pencipta lapangan kerja atau *job creator*.

Strategi tersebut di atas dijalankan melalui program pelatihan, program magang, kegiatan pembinaan, dan bimbingan agar mereka mengetahui kemudahan dalam menciptakan dan merintis usaha yang menguntungkan, sehingga mereka pun terdorong untuk menjadi wirausahawan muda pertanian (*agro sociopreneur*) yang mampu menggerakkan dan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian.

Program PWMP dirancang untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai *center of agripreneur development* berbasis inovasi agribisnis dengan bantuan modal usaha kepada pelajar/mahasiswa dan alumni yang peduli terhadap dunia usaha pertanian melalui PWMP regular dan PWMP hibah kompetitif. Pada tahun 2025, program PWMP regular telah memberikan bantuan pada 32.641 orang dari target 25.774 orang. Rincian Jumlah PWMP menurut Unit Kerja (UPT) lingkup Badan PPSDMP tahun 2025 pada tabel berikut.





Tabel 29. Rincian umlah PWMP Menurut Unit Kerja (UPT) Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2025

No	UPT	Jumlah
1	PEPI Serpong	19
2	Polbangtan Bogor	202
3	Polbangtan Gowa	22
4	Polbangtan Manokwari	35
5	Polbangtan Medan	20
6	Polbangtan Yoma	12
7	SMK PP Negeri Sembawa	18
8	SMK PP Negeri Kupang	14
TOTAL		342

Sumber Data: BPPSDMP, Tahun 2025

c. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal (Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar)

Tugas belajar merupakan program pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh Kementerian Pertanian atau sumber pembiayaan dari lembaga lain. Tugas belajar program S2 dan S3 dalam negeri bekerja sama dengan tiga belas perguruan tinggi terbaik di Indonesia diantaranya; Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga, Universitas Jenderal Soedirman (UNSEOD), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (UNAND), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Pada tahun 2025 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam hal ini Pusat Pendidikan Pertanian telah memfasilitasi 174 ASN lingkup Kementerian untuk mengikuti program pendidikan tugas belajar program S2 dan S3 di 12 PTN mitra, dengan rincian sebagai berikut: program lanjutan sebanyak 109 orang, Program S2= 43 orang, Program S3=66 orang, Program baru genap dan ganjil sebanyak 65 orang, Program S2= 50, dan Program S3=15 orang.





Gambar 42. Kegiatan Evaluasi Tugas Belajar

d. Kegiatan Swasembada Pangan

Dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan nasional, Pusat Pendidikan Pertanian pada Tahun 2025 berperan aktif dalam mendukung swasembada pangan melalui pelaksanaan program Brigade Pangan, Optimasi Lahan (OPLAH), Luas Tambah Tanam (LTT), dan pengembangan Padi Gogo yang lebih difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta peningkatan produksi tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan empat kabupaten sasaran, yaitu Kabupaten Barru, Takalar, Sinjai, dan Jeneponto.

Capaian Pusat Pendidikan Pertanian dalam program Brigade Pangan, Optimasi Lahan (OPLAH), Luas Tambah Tanam (LTT), dan pengembangan Padi Gogo di Kabupaten Barru, Takalar, Jeneponto, dan Sinjai pada tabel 29.

Tabel 30. Capaian Pusat Pendidikan Pertanian dalam program Brigade Pangan, Optimasi Lahan (OPLAH), Luas Tambah Tanam (LTT), dan pengembangan Padi Gogo di Kabupaten Barru, Takalar, Jeneponto, dan Sinjai

No	Kabupaten	Target				Realisasi			
		BP	OPLAH (Ha)	LTT	Padi Gogo	BP	OPLAH	LTT	Padi Gogo
1	Barru	10	1.953	5.251	130	11	1.953	5.755	132
2	Takalar	0	50	40.580	200	0	50	42.457	0
3	Jeneponto	0	0	46.191	500	0	0	54	
4	Sinjai	3	635	32.119	200	3	610	29.157	200

Sumber: Pusat Pendidikan Pertanian, 2025

Sebagai penanggung jawab dalam pendampingan program strategis Kementerian Pertanian seperti Brigade Pangan, Optimalisasi Lahan, Luas Tambah Tanam (LTT) dan Padi gogo di kabupaten Barru, Takalar,





Jeneponto dan Sinjai, secara umum hasil yang dicapai sudah menunjukkan angka yang sangat baik dari angka yang ditetapkan dalam target. Faktor keberhasilan dalam pendampingan program tersebut diantaranya:

1. Sinergi multi-pihak dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat/daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL), pemda, serta kelompok petani.
2. Perencanaan tanam yang baik dalam menentukan pola tanam sesuai dengan letak dan bentuk geografis di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pendampingan teknis kepada seluruh elemen mulai dari dinas terkait hingga kelompok tani menuju Indonesia Swasembada Pangan.
4. Data hasil identifikasi lahan potensial untuk optimalisasi penggunaan lahan.
5. Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna sesuai dengan karakteristik lahan.

Selain faktor keberhasilan dalam melaksanakan pendampingan program Strategis Kementerian Pertanian, terdapat capaian realisasi di Kabupaten Sinjai dan Takalar yang tidak sesuai target dimana hal tersebut terkendala karena terjadi perubahan iklim dan cuaca yang tidak mendukung dalam proses pelaksanaan tanam yang sudah dijadwalkan oleh Dinas terkait.



Gambar 43. Bimbingan teknis Pendamping BP di Wilayah SulSel





Gambar 44. Gerakan Panen Bersama wilayah Kabupaten Barru

e. Jumlah Mahasiswa dan Siswa Aktif Di Polbangtan, PEPI dan SMKPP Tahun 2025

Total Mahasiswa dan Siswa Aktif di Polbangtan, PEPI dan SMK-PP Tahun 2025 adalah **6.731 orang** yang terdiri dari mahasiswa tingkat I sampai dengan tingkat 4. Rincian Mahasiswa dan Siswa Aktif di Polbangtan, PEPI dan SMK-PP Tahun 2025 pada table berikut.

Tabel 31. Mahasiswa dan Siswa Aktif di Polbangtan, PEPI dan SMK-PP Tahun 2025

No	Polbangtan, PEPI, dan SMK-PP	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Jumlah (orang)	Ket
1	Polbangtan Medan	252	237	186	193	868	
2	Polbangtan Bogor	252	244	242	171	909	D-IV = 702 & D-III = 207
3	Polbangtan YOMA – Magelang	154	153	139	132	578	
4	Polbangtan YOMA – Yogyakarta	176	184	173	134	667	
5	Polbangtan Malang	212	235	217	191	855	
6	Polbangtan Gowa	271	267	304	213	1055	D-IV = 755 & D-III = 300
7	Polbangtan Manokwari	105	120	100	74	399	
8	PEPI Serpong	126	127	125	0	378	
9	SMK-PP Sembawa	192	155	154	0	501	
10	SMK-PP Banjarbaru	93	64	81	0	238	
11	SMK-PP Kupang	138	84	61	0	283	
	Total	1.971	1.870	1.782	1.108	6.731	

Sumber Data: Pusat PendidikanPertanian, Tahun 2025 slide hal 46 Bahan raker DPR 3 September 2025





f. Jumlah Alumni Polbangtan, PEPI dan SMKPP Tahun 2025

Total Alumni pada Polbangtan, PEPI dan SMK-PP Tahun 2025 adalah **1.761 orang**. Rincian jumlah alumni di Polbangtan, PEPI dan SMK-PP Tahun 2025 pada table berikut.

Tabel 32. Rincian Jumlah Alumni Pada Polbangtan, PEPI dan SMK PP Tahun 2025

No	Unit Kerja/UPT	Jumlah (Orang)
1	Polbangtan Medan	190
2	Polbangtan Bogor	203
3	Polbangtan Yogyakarta-Magelang	266
4	Polbangtan Malang	190
5	Polbangtan Gowa	332
6	Polbangtan Manokwari	88
7	PEPI Serpong	125
8	SMK PP Negeri Sembawa	154
9	SMK PP Negeri Banjarbaru	78
10	SMK PP Negeri Kupang	135
TOTAL		1.761

Sumber Data: Pusat Pendidikan Pertanian, Tahun 2025

2. Capaian Kegiatan Pusat Pendidikan Pertanian Lainnya

Kegiatan lainnya pada Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pendampingan Program Swasembada Pangan Berkelanjutan oleh Peserta Didik

Dalam mendukung pencapaian program swasembada pangan berkelanjutan dan program strategis Kementerian Pertanian maka lembaga pendidikan vokasi lingkup Kementerian Pertanian menerapkan proses pembelajaran melalui pendampingan program swasembada pangan berkelanjutan oleh peserta didik pada lembaga pendidikan vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

Kegiatan pendampingan program swasembada panganberkelanjutan oleh peserta didik pada lembaga pendidikan vokasi lingkup Kementerian Pertanian bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidikan formal dengan praktik-praktik di lapangan guna meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.

Kegiatan pendampingan program swasembada pangan berkelanjutan oleh peserta didik pada lembaga pendidikan vokasi lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan selama enam bulan per semester atau menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Magang atau PKL di Instansi masing-masing di lokasi program optimalisasi lahan, cetak sawah rakyat,





pertanian modern, program strategis Kementerian Pertanian dan/atau lokasi lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia

Pada tahun 2025 telah dilakukan pemberangkatan 1.332 mahasiswa magang pendampingan brigade pangan dan pemberangkatan 215 mahasiswa magang hilirisasi perkebunan, pelaksanaan TOMT bagi LO swasembada pangan untuk BP 2024 dan BP 2025 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, monitoring pelaksanaan kurikulum mendukung swasembada pangan di 6 polbangtan yaitu PEPI, Polbangtan Yoma, Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Gowa dan Polbangtan Malang, pelaksanaan pelatihan bagi BP model sebanyak 2 angkatan, sertabimbingan teknis brigade pangan wilayah Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Merauke, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Jambi, Riau dan Bangka Belitung.

b. Kegiatan transformasi kelembagaan pendidikan tinggi dan menengah pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan eksistensi kelembagaan pendidikan tinggi vokasi pertanian sesuai perubahan kebijakan dan regulasi terkait dengan pendidikan tinggi khususnya dengan adanya Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi kementerian/lembaga dengan keluaran kegiatan peta jalan penyesuaian penyelenggaraan pendidikan pada politeknik lingkup kementerian pertanian dan dokumen (naskah akademik pengembangan politeknik lingkup Kementerian Pertanian menjadi pendidikan kedinasan.



Gambar 45. Rapat Tim Kecil menindaklanjuti Hasil Evaluasi PTKL dan Penyiapan Sekolah Kedinasan

c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pertanian dengan penguatan kelembagaan melalui pengelolaan PD Dikti dan Simpatik dan Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja di





lingkungan Politeknik, meningkatnya layanan kepada masyarakat, dan melakukan penguatan kelembagaan dengan keluaran Keputusan Kepala Badan tentang Pedoman Pelaksanaan SPMI Pelaksanaan Pelatihan SPMI, AMI dan Sertifikasi Kompetensi Auditor AMI (32 orang) bekerjasama dengan UNY secara online, sPengawalan dan Sinkronisasi data pada PD-DIKTI melalui zoom dengan Pusdatin Kemendikisaintek terkait data pendidikan (data dosen, data mahasiswa, dan aktivitas pembelajaran)-serta Pengembangan Aplikasi Sistem Audit Mutu Internal (SIAMI) –aplikasi yang digunakan untuk penilaian AMI antar Politeknik Kementan.

d. Bimbingan Teknis *Applied Approach*

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dosen terkait sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, profesionalitas sebagai pendidik, serta penguatan pedagogis di lingkungan kementerian terkait dengan keluaran 25 orang dosen yang mendapatkan Sertifikat *Applied Approach*.

e. Pembinaan Karir Dosen, Guru, Dan PLP

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap penguasaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Hasil uji kompetensi diketahui 5 orang Guru SMK Pertanian Pembangunan mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi (1 orang Guru Pertama dan 4 orang Guru Muda). Selain itu juga dilakukan kegiatan kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli ke Lektor dan Lektor ke Lektor Kepala. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong tenaga pendidik untuk mengembangkan kemampuan diri, memberikan motivasi kepada Tenaga Pendidik untuk bekerja dengan aktif, mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki Politeknik dan SMK PP lingkup Kementerian Pertanian guna memberikan pendidikan yang berkualitas.

F. CAPAIAN KEGIATAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN TAHUN 2025

1. Kegiatan Utama Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025

Capaian Kegiatan Utama Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) Tahun 2025 antara lain:

a. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

Pusbintan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi ASN Pertanian selain di biayai oleh DIPA Pusbintan, juga menyelenggarakan penilaian kompetensi yang pembiayaannya dibebankan pada masing-





masing instansi yang akan melakukan uji kompetensi. Sampai bulan Desember, Pusbintan telah melaksanakan uji kompetensi bagi 5.472 orang. Rincian Data Uji Kompetensi dapat dilihat pada *lampiran 4*.

b. Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi

Percepatan implementasi sistem pembelajaran terintegrasi ditandai dengan peluncuran Kementerian Pertanian Corporate University, yang dihadiri oleh Deputi Pembelajaran Terintegrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan peluncuran ini telah dilaksanakan pada 26 Agustus 2025. Melalui peluncuran tersebut, diharapkan Kementerian Pertanian dapat bertransformasi menjadi organisasi pembelajar dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi diawali dengan perencanaan pengembangan kompetensi. Adapun perencanaan pengembangan kompetensi ASN pada tahun 2025 mengacu pada *Human Capital Development Plan (HCDP) 2025*, yang disusun berdasarkan hasil pemetaan kompetensi ASN Tahun 2024 melalui metode *Computer Assisted Competency Test (CACT)*. HCDP menjadi acuan utama dalam memastikan keselarasan antara kebutuhan pengembangan kompetensi individu dengan tujuan strategis organisasi, sehingga pengembangan SDM dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah. Sebagai langkah strategis dalam sistem pembelajaran terintegrasi, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian membangun Kementan Corpu yang telah berhasil mengembangkan empat sistem informasi, yaitu:

- 1) Website Kementan Corporate University;
- 2) Platform Pembelajaran ASN Mandiri dan Aktif (PLASMA);
- 3) *Learning Management System (LMS)*; dan
- 4) *Knowledge Management System (KMS)*

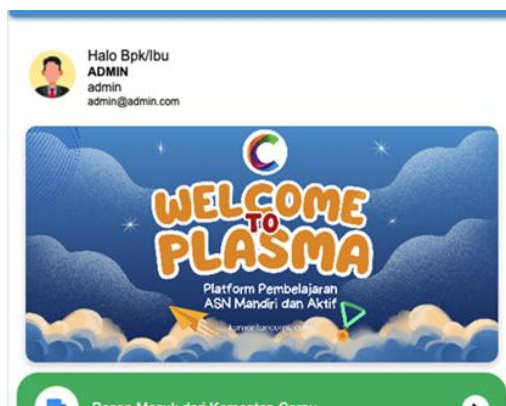
Keempat sistem informasi tersebut berfungsi sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan Corporate University di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan pengetahuan juga menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Pertanian berhasil menghimpun sebanyak **2.901 aset pengetahuan** yang bersumber dari seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pertanian. Penghimpunan aset pengetahuan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam membangun dan memperkuat manajemen pengetahuan organisasi.





Gambar 46. Identifikasi Aset Pengetahuan, Pusat Penilaian dan Pengembangan ASN Pertanian, Tahun 2025



Gambar 47. Sistem Informasi Pembelajaran Platform Belajar ASN Mandiri dan Aktif (PLASMA)



Gambar 48. *Launching Kementerian Pertanian Corporate University, 26 Agustus 2025*





c. Pengembangan Website Pusbintan

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan publikasi kegiatan, Pusbintan melakukan pengembangan website resmi sebagai media informasi dan komunikasi organisasi.

Website Pusbintan yang dapat diakses melalui alamat: <https://pusatkompetensiasn.bppsdmp.pertanian.go.id/> berfungsi sebagai sarana publikasi kegiatan, penyampaian informasi layanan, serta dokumentasi berbagai program dan capaian Pusbintan. Keberadaan website ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi bagi ASN, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus memperkuat citra institusi yang terbuka dan profesional.

d. Pengembangan WA center

Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan responsivitas terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, Pusbintan mengembangkan WhatsApp Centre sebagai kanal komunikasi resmi dengan nomor 0811-8121-0833. Masyarakat, ASN, dan mitra kerja dapat memperoleh informasi serta berkomunikasi secara langsung terkait layanan penilaian dan pengembangan kompetensi. Kehadiran WA Centre ini menjadi bentuk adaptasi Pusbintan terhadap kebutuhan layanan yang cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi komunikasi yang familiar bagi pengguna.

e. Pengembangan Media Social

Pusbintan juga melakukan pengembangan media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi publik dan diseminasi informasi yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kegiatan, edukasi terkait penilaian dan pengembangan kompetensi ASN, serta membangun interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Media sosial yang dikelola meliputi Facebook: Pusbintan Kementan, intagram: @pusbintan, Thread: @pusbintan, Tiktok: @pusbintan, youtube: @pusbintan.

f. Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Pusbintan telah membentuk Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID). Pembentukan PID ini merupakan komitmen Pusbintan dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui PID, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan akuntabel, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.





2. Kegiatan Lainnya Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025

Capaian Kegiatan Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) Tahun 2025 lainnya antara lain:

a. Pengawasan dan Pendampingan Supervisi mendukung Program Utama Kementan

Tahun 2025 terdapat program utama yang berkesinambungan yaitu Opimalisasi Lahan (Oplah), Luas Tambah Tanam (LTT) dan pembentukan Brigade Pangan untuk daerah yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung jawab propinsi dan Kabupaten/Kota pada kegiatan Swasembada pangan, Pusbintan ditunjuk sebagai penanggung jawab lapangan program LTT integrasi tahun 2025 di Kabupaten Cianjur dan Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan target dan realiasi sebagai berikut:

Tabel 33. Target dan Realisasi LTT Kab. Cianjur dan Indramayu

No	Kegiatan	Kab. Cianjur			Kab. Indramayu		
		Target	Realiasi	%	Target	Realisasi	%
1	Opimalisasi Lahan (Ha)	735	155	21	490	490	100
2	Brigade Pangan (BP)	3	3	100	2	4	200
3	Target LTT Reguler	194.932	165.461	85	278.304	232.304	83,50
4	Target Padi Gogo	3.950	9.128	231	7.298	0	0

Sumber Data: Pusbintan, Tahun 2025

Selain sebagai Penanggung Jawab lapangan program LTT, Pusbintan juga di tunjuk sebagai Liaison Officer Brigade Pangan (BP) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 128/Kpts/SM.010/I/07/2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 71/Kpts/SM.010/1/03/2025 Tentang Penetapan Liaison Officer Brigade Pangan Pada Lokasi Luas Tambah Tanam Integrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Target BP Propinsi Jawa barat adalah 113 BP, berdasarkan realisasi pelaksanaan Optimalisasi Lahan (Oplah) non rawa di Propinsi Jawa Barat dilakukan rasionalisasi target menjadi 94 BP.





Adapun realisasi pembentukan BP di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi Pembentukan Brigade Pangan di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten	Target	Realisasi	%
1	Kab. Sukabumi	14	10	71
2	Kab. Cianjur	3	4	133
3	Kab. Garut	3	3	100
4	Kab. Tasikmalaya	0	0	0
5	Kab. Ciamis	7	2	29
6	Kab. Kuningan	7	6	29
7	Kab. Majalengka	0	0	0
8	Kab. Indramayu	2	5	250
9	Kab. Subang	44	44	100
10	Kab. Purwakarta	2	4	200
11	Kab. Karawang	3	5	167
12	Kab. Pangandaran	9	6	67
13	Kab. Bandung	0	0	0
14	Kab. Bogor	0	0	0
15	Kab. Sumedang	0	2	
16	Kota Sukabumi	0	0	0
17	Bekasi	0	5	
Total		94	96	102%

Sumber Data: Pusbintan, Tahun 2025

G. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) INSPEKTORAT JENDERAL

Capaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern atau Inspektorat Jenderal pada Badan PPSDMP Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat berhasil, dengan realisasi sebesar 96,67% dari target 90%. Berdasarkan hasil pemantauan, jumlah total temuan Inspektorat Jenderal jumlah total rekomendasi Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024 adalah sebanyak 481 temuan, dengan jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 463 temuan. Rincian pemantauan tindak lanjut rekomendasi administrasi Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa dari 61 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dengan total 481 rekomendasi, sebanyak 463 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan tersisa 18 rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian. Sebagian besar jenis pengawasan telah ditindaklanjuti secara tuntas dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%, antara lain pengawasan AKIP, anggaran, pengadaan barang/jasa, BMN, BAST bantuan pemerintah, reviu laporan keuangan, serta pengawasan dan PHLN. Adapun beberapa jenis pengawasan yang masih menyisakan rekomendasi, seperti pengawasan ketaatan, kinerja, PWMP, dan tugas belajar, tetap menjadi perhatian untuk segera diselesaikan pada periode





berikutnya. Data Pemantauan Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal TA 2025 pada berikut.

Tabel 35. Data Pemantauan Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal TA 2025

No	Jenis Pengawasan	JML LHP	Rekomendasi Administrasi			%
			Jml	TL	Sisa	
1	AKIP	1	6	6	0	100
2	Anggaran	10	32	32	0	100
3	Pengadaan Barang/Jasa	1	14	14	0	100
4	BAST Banpem	1	2	2	0	100
5	Blokir <i>Automatic Adjustment</i>	2	6	6	0	100
6	BMN	3	8	8	0	100
7	BPK RI	6	22	22	0	100
8	Ketaatan	7	106	105	1	99,06
9	Kinerja	4	63	62	1	98,41
10	LAKIN	1	10	10	0	100
11	Pengawasan	6	20	20	0	100
12	PHLN	1	54	54	0	100
13	PIPK	1	2	2	0	100
14	PNBP	1	1	1	0	100
15	PWMP	3	28	14	14	50
16	Reviu LK	5	32	32	0	100
17	Pagu Indikatif	1	59	59	0	100
18	Revisi DIPA	3	3	3	0	100
19	RKAKL	2	7	7	0	100
20	SPI	1	3	3	0	100
21	Tugas Belajar	1	3	1	2	33,33
TOTAL		61	481	463	18	96,67

Sumber Data: Sekretariat BPPSDMP, Tahun 2025

H. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BPK

Capaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat berhasil, dengan realisasi 100% dari target 87,00%, atau tingkat capaian sebesar 114,94%. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, jumlah total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BPPSDMP yang terbit pada Tahun 2024 adalah sebanyak 36 rekomendasi dan sampai dengan Tahun 2025 seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPPSDMP. Rekomendasi yang sudah dinyatakan sesuai sebanyak 35 rekomendasi dan belum sesuai sebanyak 1 rekomendasi. Capaian ini menunjukkan bahwa BPPSDMP memiliki komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA pada tabel berikut.





Tabel 36. Progress Tindak Lanjut Pemeriksaan LHP BPK RI TA 2025

No	No LHP	Judul LHP	Jumlah LHP	Rekomendasi	Status		
					Sesuai	Belum Sesuai	TPTD
1	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan 2023	1	5	4	1	-
2	25/LHP/XVII/06/2024	LK READSI 2023	1	20	20	-	-
3	26/LHP/XVII/06/2024	LK YESS 2023	1	11	11	-	-
Jumlah			3	36	35	1	-

Sumber Data: Sekretariat Badan PPSDMP, Tahun 2025

I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PPSDMP TAHUN 2025

Kinerja Badan PPSDMP tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan PPSDMP adalah bentuk penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala Badan PPSDMP. Sasaran program, Indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada PK Kepala Badan PPSDMP tahun 2025. Rincian Capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2025 pada tabel 31.

Tabel 37. Capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Inikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP (Indeks)	0,7798	0,94	120.54%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas (%)	1,00%	1,02%	102%	Sangat Baik

Sumber Data: Badan PPSDMP, Tahun 2025

Persentase capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2025 menunjukkan bahwa semua target indikator kinerja tercapai dan semua kategori masuk dalam kategori sangat baik. Capaian yang paling tinggi adalah Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP dengan capaian sebesar 120,54%. Analisa capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama Badan PPSDMP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP

Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPSDMP, yang mencakup aspek pengawasan, akuntabilitas





kinerja, pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta dukungan manajemen internal. Pada tahun 2025, nilai Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP mencapai 94,80 pada skala 100 atau setara dengan 0,948 pada skala 0-1, sehingga berada pada kategori sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2025–2029, tata kelola birokrasi telah dilaksanakan secara konsisten dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tingginya capaian indeks ini dipengaruhi oleh:

- a. Kinerja Pengawasan Intern dan Ekstern yang Efektif, tercermin dari tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK RI.
- b. Dari aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan.
- c. Pada dimensi kualitas pelayanan publik, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa layanan BPPSDMP di bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sumber daya manusia pertanian telah memenuhi standar pelayanan dan harapan pengguna layanan.
- d. Dukungan Manajemen Internal, capaian ini diukur melalui Indeks Kepuasan Internal yang menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem dukungan internal telah berjalan efektif, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi antar unit kerja, serta optimalisasi sistem pendukung manajemen untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP Tahun 2025 mencerminkan tingkat kematangan tata kelola yang tinggi dan sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

2. Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Naik Kelas

Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas digunakan untuk mengukur keberhasilan BPPSDMP dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan profesionalisme pelaku usaha tani melalui penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi petani. Peningkatan kelas dimaknai sebagai perubahan status dan kapasitas usaha pelaku, baik individu maupun kelembagaan, yang terverifikasi melalui pemenuhan indikator usaha, peningkatan kinerja ekonomi, serta penerapan tata kelola agribisnis yang lebih baik. Pada Tahun 2025, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan





efektivitas pelaksanaan program BPPSDMP yang berfokus pada pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha tani. Peningkatan kelas pelaku usaha tani tercermin dari beberapa aspek utama antara lain:

- a. Transformasi Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menunjukkan peningkatan formalitas dan kapasitas organisasi usaha tani. Pada Tahun 2025, penumbuhan KEP tercatat sebanyak 431 kelembagaan, yang merupakan selisih antara total KEP Tahun 2025 sebanyak 14.732 dan total KEP Tahun 2024 sebanyak 14.301.
- b. Keberadaan Brigade Pangan sebagai model kelembagaan usaha tani kolektif. Pada Tahun 2025, sebanyak 279 Brigade Pangan tercatat mengalami peningkatan kelas usaha sesuai unsur penilaian yang ditetapkan. Brigade Pangan berperan dalam meningkatkan skala usaha, efisiensi produksi, serta integrasi usaha tani dalam rantai nilai agribisnis melalui dukungan alsintan, optimalisasi lahan, dan peningkatan Indeks Pertanaman.
- c. Dari aspek operasional dan ekonomi, peningkatan kelas pelaku usaha tani tercermin dari bertambahnya skala produksi, meningkatnya produktivitas, serta meningkatnya nilai tambah usaha.
- d. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan bagi aparatur dan non-aparatur, program magang internasional, serta bimbingan teknis Brigade Pangan.
- e. Pengembangan Petani milenial yang memberikan kontribusi terhadap percepatan adopsi teknologi dan inovasi usaha tani yang memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPPSDMP telah berjalan efektif dan selaras dengan sasaran strategis Renstra 2025–2029. Pencapaian ini menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam mendukung transformasi sumber daya manusia pertanian dan penguatan sistem agribisnis nasional.





BAB VI

PRESTASI DAN PENGHARGAAN BADAN PPSDMP TAHUN 2025

A. PENGHARGAAN MURI ATAS REKOR PEREKRUTAN PETANI MUDA TERBANYAK

Penghargaan MURI tanggal 16 Desember Tahun 2025 nomor 12568/R.MURI/XII/2025 bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta, dianugerahkan kepada Menteri Pertanian Dr.Ir.H.Andi Amran Sulaiman, MP atas rekor Perekrutan Petani Muda Terbanyak yaitu 416.667 orang petani muda.



Gambar 49. Penghargaan MURI kepada Menteri Pertanian Dr.Ir.H.Andi Amran Sulaiman, MP atas rekor Perekrutan Petani Muda Terbanyak, di Auditorium Kementan Jakarta, Tanggal 16 Desember 2025

B. PENGHARGAAN MURI ATAS REKOR PELIBATAN PENYULUH PENDAMPING TERBANYAK DALAM BRIGADE PANGAN

Penghargaan MURI tanggal 16 Desember Tahun 2025 nomor 12569/R.MURI/XII/2025, bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta, dianugerahkan kepada Menteri Pertanian Dr.Ir.H.Andi Amran Sulaiman, MP atas rekor Pelibatan Penyuluh Pendamping Terbanyak dalam Brigade Pangan yaitu 38.235 penyuluh pendamping.



Gambar 50. Penghargaan MURI kepada Menteri Pertanian Dr.Ir.H.Andi Amran Sulaiman, MP atas rekor Pelibatan Penyuluh Pendamping Terbanyak dalam Brigade Pangan yaitu 38.235 penyuluh pendamping di Auditorium Kementan Jakarta, Tanggal 16 Desember 2025





C. PENGHARGAAN SWASEMBADA PANGAN TAHUN 2025 KEPADA PENANGGUNG JAWAB PROVINSI DAN KABUPATEN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Kementerian Pertanian memberikan Penghargaan Swasembada Pangan Tahun 2025 kepada Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten (Eselon II) lingkup Kementerian Pertanian, bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta, tanggal 16 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. SKM/TAM:
 - a. Dr.Sam Herodian
 - b. Ir. H.Nandang Sudrajat, MH
 - c. Ir. Hendri Sosiawan,CESA
 - d. Dr.Anny Mulyani
 - e. Imam Wahyudi,S.Ikom.,S.Sos
 - f. Prof.Dr.Ir.Muhammad Syakir MS
 - g. Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana
2. Penanggungjawab Provinsi
 - a. Andi Faisal,SP,MP., Pj Prov.NTT- Ka.BB Benih Pelin Perkebunan
 - b. Dr.O'eng Anwarudin,S.Pt.,M.Si., Pj.Prov.Papua Selatan - Direktur Polbangtan Manokwari
 - c. Dr.Ir.Suwandi,M.Si.,Pj. Prov.Sumatera Selatan - Sekretaris Jenderal
 - d. Heru Tri Widarto,S.Si,M.Sc., Pj.Prov Sumatera Utara - Sesdit Perkebunan
 - e. Dr.Ir.Dyah Susilokarti,M.P., Pj. Prov.NTB – Direktur Aneka Kacang dan Umbi
3. Penanggungjawab Kabupaten
 - a. Dr.Ir.Leli Nuryati,M.Sc, Pj Kabupaten Sukabumi - Ka.Pusat PVT
 - b. Dr.Detia Tri Yunandar,SP.,M.Si., Pj.Kabupaten Bone - Direktur Polbangtan Gowa
 - c. Nurul Komariah,S.Sos,M.Si., Pj.Kabupaten Jombang - Kepala BBPP Ketindan
 - d. Dr.Ir.Ajat Jatnika,M.Sc.,Pj.Kabupaten Ciamis - Kepala BBPP Lembang
 - e. Dr.Ir.Agung Prabowo,M.Eng.,Plt.Ka.BB Mekanisasi





Gambar 51. Penghargaan Swasembada Pangan Tahun 2025 kepada Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten (Eselon II) lingkup Kementerian Pertanian, di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta, tanggal 16 Desember 2025

D. SERTIFIKAT PENGAKUAN KELAYAKAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI ASN

Pusbintan Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian mendapatkan Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN. Pengakuan ini dicapai Pusbintan Tahun 2025 dengan Kategori A yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Dengan pengakuan ini Pusbintan telah memenuhi standar kelayakan Penyelenggara Penilaian kompetensi ASN.



Gambar 52. Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Kompetensi ASN





E. PENGHARGAAN ZOOM EVENT INNOVATOR AWARD ASIA TAHUN 2025

Pusluhtan Badan PPSDMP Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan *Zoom Event Innovator Award* Asia tahun 2025. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas pemanfaatan luar biasa dalam menggunakan *zoom* untuk mendorong hasil dan inovasi yang bermakna terkait sinergi petani dan teknologi dari *Zoom Asia Customer Innovator Award* Tahun 2025 di Jakarta, tanggal 03 Desember 2025.



Gambar 53. Penghargaan Zoom Event Innovator Award Asia tahun 2025 Kepada Pusluhtan Badan PPSDMP di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2025





BAB VII PENUTUP

Laporan Tahunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2025 merupakan laporan pelaksanaan serta capaian program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sepanjang Tahun 2025. Beberapa target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah tercapai, namun demikian masih terdapat beberapa target yang kurang memenuhi sehingga diperlukan upaya dan kerja keras Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan baik satker pusat dan daerah dalam pencapaian target kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan serta capaian program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2025 memerlukan perbaikan dan kerja keras seluruh jajaran lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.





LAMPIRAN





Lampiran 1.

REKAPITULASI DATA KELEMBAGAAN PETANI TAHUN 2025 KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

NO.	PROVINSI	JUMLAH KAB./KOTA	KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
1	Aceh	23	634
2	Bali	9	55
3	Banten	8	166
4	Bengkulu	10	123
5	D.I. Yogyakarta	5	477
6	DKI Jakarta	6	6
7	Gorontalo	6	49
8	Jambi	11	341
9	Jawa Barat	27	1.644
10	Jawa Tengah	35	2.788
11	Jawa Timur	38	1.624
12	Kalimantan Barat	14	213
13	Kalimantan Selatan	13	393
14	Kalimantan Tengah	14	162
15	Kalimantan Timur	10	98
16	Kalimantan Utara	5	56
17	Kepulauan Bangka Belitung	7	38
18	Kepulauan Riau	7	20
19	Lampung	15	273
20	Maluku	11	30
21	Maluku Utara	10	17
22	Nusa Tenggara Barat	10	731
23	Nusa Tenggara Timur	22	447
24	Papua	9	32
25	Papua Pegunungan	8	-
26	Papua Selatan	4	6
27	Papua Tengah	8	11
28	Papua Barat	7	9
29	Papua Barat Daya	6	13
30	Riau	12	186
31	Sulawesi Barat	6	746
32	Sulawesi Selatan	24	859
33	Sulawesi Tengah	13	221
34	Sulawesi Tenggara	17	431
35	Sulawesi Utara	15	86
36	Sumatera Barat	19	356
37	Sumatera Selatan	17	772
38	Sumatera Utara	33	619
Jumlah		514	14.732

Sumber Data: Pusat Penyuluhan Pertanian, Tahun 2025





Lampiran 2.

REKAPITULASI DATA KELEMBAGAAN PETANI TAHUN 2025 KELOMPOK TANI BERDASARKAN KELAS KELOMPOK

NO.	PROVINSI	JUMLAH KAB./KOTA	JUMLAH KELOMPOK TANI BERDASARKAN KELAS KELOMPOK					
			PEMULA	LANJUT	MADYA	UTAMA	BELUM DIKETAHUI	JUMLAH
1	Aceh	23	24.612	6.335	614	34	3.340	34.935
2	Bali	9	6.245	2.959	1.742	278	2.473	13.697
3	Banten	8	5.531	3.637	672	206	260	10.306
4	Bengkulu	10	11.342	1.657	38	2	971	14.010
5	D.I. Yogyakarta	5	3.812	3.103	1.717	236	1.201	10.069
6	DKI Jakarta	6	426	50	9	-	78	563
7	Gorontalo	6	6.994	675	45	2	1.774	9.490
8	Jambi	11	10.247	3.059	399	29	3.499	17.233
9	Jawa Barat	27	34.287	21.925	2.634	215	3.605	62.666
10	Jawa Tengah	35	34.103	20.060	4.489	499	10.775	69.926
11	Jawa Timur	38	22.139	19.147	5.759	516	4.542	52.103
12	Kalimantan Barat	14	18.609	4.332	309	20	2.567	25.837
13	Kalimantan Selatan	13	9.646	5.052	757	34	2.183	17.672
14	Kalimantan Tengah	14	8.869	1.293	64	1	2.468	12.695
15	Kalimantan Timur	10	7.911	1.972	121	5	1.435	11.444
16	Kalimantan Utara	5	2.135	194	22	1	442	2.794
17	Kepulauan Bangka Belitung	7	4.800	868	54	3	537	6.262
18	Kepulauan Riau	7	1.654	61	3	-	541	2.259
19	Lampung	15	23.920	11.394	1.246	70	1.874	38.504
20	Maluku	11	5.045	288	13	2	3.436	8.784
21	Maluku Utara	10	4.509	319	39	3	2.275	7.145
22	Nusa Tenggara Barat	10	14.281	11.400	1.195	43	648	27.567
23	Nusa Tenggara Timur	22	25.756	6.105	452	36	7.156	39.505
24	Papua	9	1.691	140	40	3	1.193	3.067
25	Papua Pegunungan	8	626	233	18	16	276	1.169
26	Papua Selatan	4	1.800	289	9	1	412	2.511
27	Papua Tengah	8	1.100	112	7	-	360	1.579
28	Papua Barat	7	1.419	126	2	-	318	1.865
29	Papua Barat Daya	6	828	44	4	1	300	1.177
30	Riau	12	17.269	3.401	296	14	2.263	23.243
31	Sulawesi Barat	6	6.594	2.760	785	114	2.240	12.493
32	Sulawesi Selatan	24	37.405	13.089	2.267	183	6.348	59.292
33	Sulawesi Tengah	13	20.637	3.595	296	12	3.527	28.067
34	Sulawesi Tenggara	17	10.911	4.351	215	10	262	15.749
35	Sulawesi Utara	15	16.767	1.585	108	16	1.923	20.399
36	Sumatera Barat	19	17.213	5.469	401	14	804	23.901
37	Sumatera Selatan	17	24.034	9.602	1.215	138	3.520	38.509
38	Sumatera Utara	33	33.558	8.065	664	72	4.615	46.974
Jumlah		514	478.725	178.746	28.720	2.829	86.441	775.461

Sumber Data: Pusat Penyuluhan Pertanian, Tahun 2025





Lampiran 3.

REKAPITULASI DATA KELEMBAGAAN PETANI TAHUN 2025 JUMLAH KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

NO.	PROVINSI	JUMLAH KAB./KOTA	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK TANI (PETANI)	GABUNGAN KELOMPOK TANI	KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
1	Aceh	23	896.175	4.628	634
2	Bali	9	372.301	920	55
3	Banten	8	454.308	1.333	166
4	Bengkulu	10	264.712	1.239	123
5	D.I. Yogyakarta	5	429.682	440	477
6	DKI Jakarta	6	4.346	74	6
7	Gorontalo	6	198.676	673	49
8	Jambi	11	357.987	1.485	341
9	Jawa Barat	27	3.301.452	5.459	1.644
10	Jawa Tengah	35	3.619.700	8.295	2.788
11	Jawa Timur	38	4.402.995	8.066	1.624
12	Kalimantan Barat	14	546.871	1.599	213
13	Kalimantan Selatan	13	455.251	1.888	393
14	Kalimantan Tengah	14	224.108	1.037	162
15	Kalimantan Timur	10	189.988	713	98
16	Kalimantan Utara	5	47.555	227	56
17	Kepulauan Bangka Belitung	7	125.017	344	38
18	Kepulauan Riau	7	29.439	219	20
19	Lampung	15	1.052.422	2.455	273
20	Maluku	11	54.773	380	30
21	Maluku Utara	10	53.237	510	17
22	Nusa Tenggara Barat	10	902.747	1.260	731
23	Nusa Tenggara Timur	22	624.669	2.738	447
24	Papua	9	27.345	415	32
25	Papua Pegunungan	8	734	155	-
26	Papua Selatan	4	30.989	309	6
27	Papua Tengah	8	15.401	169	11
28	Papua Barat	7	15.528	359	9
29	Papua Barat Daya	6	9.746	228	13
30	Riau	12	388.101	1.588	186
31	Sulawesi Barat	6	249.818	566	746
32	Sulawesi Selatan	24	1.556.712	2.824	859
33	Sulawesi Tengah	13	439.813	1.681	221
34	Sulawesi Tenggara	17	307.049	1.640	431
35	Sulawesi Utara	15	226.506	1.195	86
36	Sumatera Barat	19	618.847	1.341	356
37	Sumatera Selatan	17	834.353	2.919	772
38	Sumatera Utara	33	1.117.425	3.516	619
Jumlah		514	24.446.778	64.887	14.732

Sumber Data: Pusat Penyuluhan Pertanian, Tahun 2025





Lampiran 4.

RINCIAN DATA UJI KOMPETENSI PADA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

No	Uraian Kegiatan	Pesera (Orang)	Database (Realisasi)
1	Penilaian Kompetensi Seleksi Calon Wadir Polbangtan Bogor Batch 1	42	42
2	Penilaian Kompetensi Seleksi Calon Wadir Polbangtan Bogor Batch 2	7	7
3	Penilaian Kompetensi (Uji Kompetensi) Jabatan Fungsional Analis Keuangan APBN	1	1
4	Penilaian Potensi Calon Peserta Magang Taiwan	36	36
5	Uji Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	7	7
6	Penilaian Potensi Bagi Penyuluh Pertanian Pendamping Brigade Pangan	256	256
7	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian		
	- Pengawas Mutu Pakan	3	3
	- Pengawas Mutu Hasil Pertanian	7	7
	- Pengawas Bibit Ternak	12	12
	- Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	11	11
	- Penyuluh Pertanian	179	178
	- Pengawas Benih Tanaman	9	9
	- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	19	19
	- Medik Veteriner	33	33
8	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Bidang Hukum	14	14
9	Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator Pemkab Karawang	50	50
10	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pranata Komputer ANRI	2	2
11	Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025	4	4
12	Penilaian Kompetensi Bagi Calon Atase Pertanian Biro KLN	12	12
13	Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Karawang	31	31
14	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi KLH	9	9
15	Penilaian Potensi Magang Taiwan Batch 7	63	63





No	Uraian Kegiatan	Pesera (Orang)	Database (Realisasi)
16	Penilaian Kompetensi Pusdatin Jabatan Statistisi dan Pranata Komputer	5	5
17	Penilaian Kompetensi ANRI Jabatan Arsiparis	5	5
18	Penilaian Kompetensi IAKN Toraja Jabatan APK-APBN dan Jabatan Administrator	4	4
19	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Padang Pariaman	22	22
20	Assesment Pemetaan Jabatan Fungsional Lingkup ANRI	8	8
21	Uji Kompetensi Mansoskul Kenaikan Jenjang Ahli Madya BPS Provinsi NTT	2	2
22	Uji Kompetensi Mansoskul Kenaikan Jenjang Ahli Madya BPS Provinsi Bengkulu	1	1
23	Uji Kompetensi Mansoskul Kenaikan Jenjang Ahli Madya BPS Kabupaten Nias Utara	1	1
24	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Kaur	4	4
25	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Hulu Sungai Selatan	22	22
26	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Labuanbatu	24	24
27	Uji Kompetensi bagi Pejabat Pengawas Lingkup Pemkab. Karawang	50	50
28	Penilaian Kompetensi Mansoskul JPT Pratama Sekda Pemerintah Kota Singkawang	6	6
29	Penilaian Kompetensi Mansoskul JPT Pratama Sekda Pemkab Seluma	4	4
30	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Kehutanan	20	20
31	Penilaian Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan BMKG	2	2
32	Penilaian Kompetensi Mansoskul JPT Pratama Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	1
33	Penilaian Kompetensi Mansoskul Selter JPT Pratama lingkup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	13	13
34	Assessment Center untuk Penilaian Potensi dan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan Batch 1	193	193
35	Assessment Center untuk Penilaian Potensi dan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan Batch 2	34	34
36	Asesmen Pegawai dengan Metode SJT (Situational Judgement Test) di Lingkungan Kementerian Pertanian	4.855	4.114





No	Uraian Kegiatan	Pesera (Orang)	Database (Realisasi)
37	Assessment Center Dalam Rangka Seleksi Terbuka JPT Kementerian Perindustrian	34	34
38	Assessment Center dalam rangka Seleksi Terbuka JPT Pratama Kementerian Pertanian	34	34
39	Assessment Bagi Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi	39	39
40	Assessment bagi Peserta Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	24	24
JUMLAH		6.214	5.472

Sumber Data: Pusbintan, Tahun 2025

